



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN PADA SITUS  
RESMI PEMERINTAH DAERAH  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**FEBRI MEDINA  
0906607794**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM EKSTENSI AKUNTANSI  
DEPOK  
2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRANSPARANSI  
INFORMASI KEUANGAN PADA SITUS RESMI PEMERINTAH  
DAERAH DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi**

**NAMA: FEBRI MEDINA**

**NPM: 0906607794**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM EKSTENSI AKUNTANSI  
DEPOK  
2012**

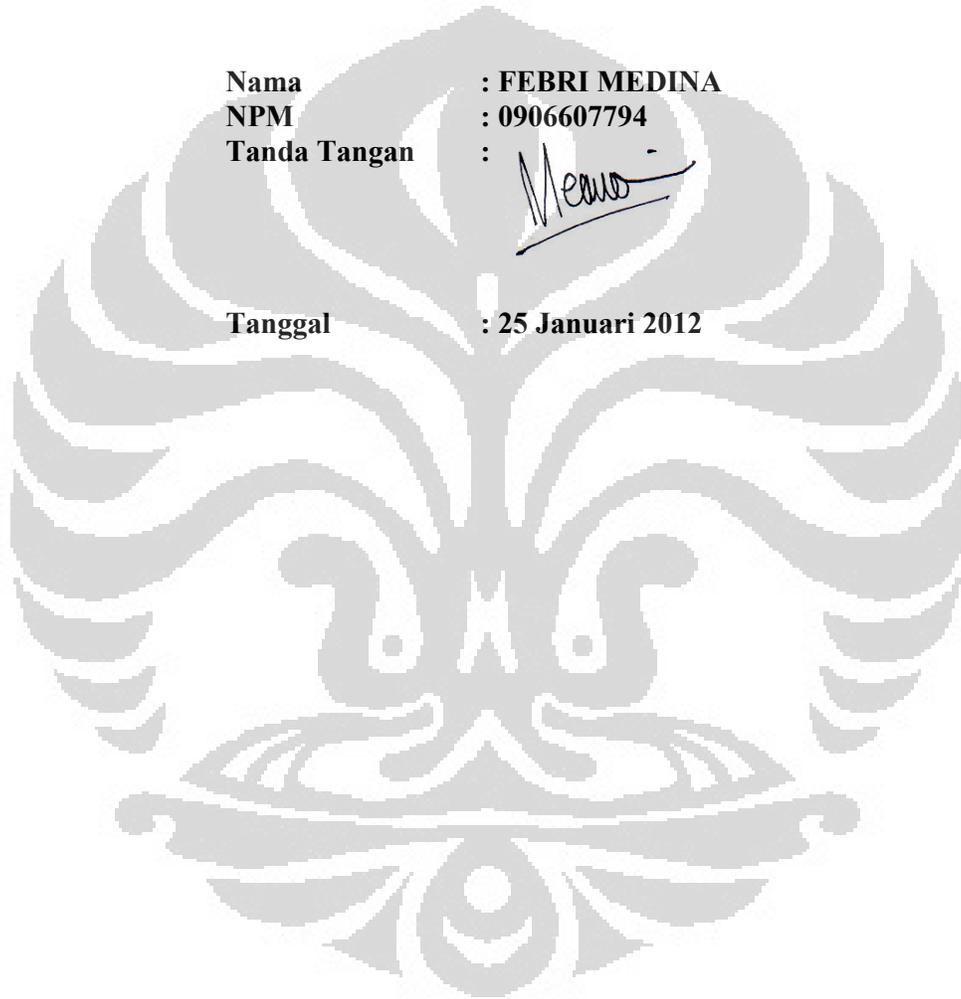
## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : FEBRI MEDINA  
NPM : 0906607794  
Tanda Tangan :



Tanggal : 25 Januari 2012



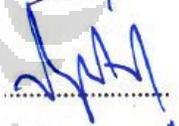
## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Febri Medina  
NPM : 0906607794  
Program Studi : Ekstensi  
Judul Skripsi  
- Indonesia : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN PADA SITUS  
RESMI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA  
- Inggris : FACTORS AFFECTING THE TRANSPARENCY OF LOCAL  
GOVERNMENT FINANCIAL INFORMATION ON THE  
WEBSITE IN INDONESIA

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 – Program Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Debby Fitriary, SE., MSM. (  )

Penguji : Dyah Setyaningrum, S.E., Ak., MSM. (  )

Penguji : Yan Rahardian, S.E., M.S.AK (  )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 25 Januari 2012

KPS Ekstensi Akuntansi



(SRI NURHAYATI, MM., S.A.S)

NIP: 196003171986022001

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febri Medina  
NPM : 0906607794  
Program Studi : Ekstensi Akuntansi  
Departemen : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan  
Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 25 Januari 2012

Yang menyatakan



(Febri Medina)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penyusunan penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan penelitian ini sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Alm. Freddy Maulana dan Ibunda Hj. Nurbaiti yang aku sayangi serta keluarga besar penulis yang selalu senantiasa memberikan bantuan serta dukungan material dan moril selama penulis kuliah dan selama penyelesaian skripsi ini. Khususnya untuk abang Irsan dan kak ita yang selalu memberikan dukungan finansial dan dorongan untuk terus maju dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Debby Fitriyani, S.E, M.S.M selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian penelitian ini berupa saran dan kritiknya sehingga penelitian ini dapat selesai tepat waktu.
3. Ibu Dyah Setyaningrum, S.E., Ak., MSM dan Bapak Yan Rahadian, S.E., M.S.Ak selaku tim penguji yang telah memberikan banyak masukan sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik.
4. Ibu Sri Nurhayati, MM., S.A.S selaku dosen yang turut memberi dukungan moril dan spiritual selama pengerjaan penelitian ini.
5. Bapak Nurholis, MSE selaku dosen yang telah sangat sabar dan banyak meluangkan waktu pagi, siang, sore bahkan shubuh untuk mendengar dan membantu penulis dalam menemukan solusi dari setiap masalah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
6. Airin Razif, Dini Kurniawati, Lizza Ming, Goldamia Elka, Alvi Syarifah, dan Maria Juliana yang selalu memberikan semangat dan berjuang bersama selama proses penyusunan skripsi ini.

7. Nadya Berthami, Ghea Gemalasari, dan Cha Halida yang selalu mendukung dan membantu penulis selama proses penulisan.
8. Cici dede dan Mas Tri yang banyak membantu penulis selama proses penulisan.
9. Teman-teman seperjuangan dalam masa bimbingan, Widya, Rina, dan Mia yang saling memberikan masukan dan mengingatkan kewajiban-kewajiban dalam proses penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman kuliah angkatan 2009, Radhit yang telah banyak membantu dalam menghadapi kendala-kendala dalam pengerjaan skripsi ini, Padwin Leonardo yang memberikan inspirasi mengenai topic-topik skripsi, Dewi, Alifia, Mba Tien, Taufik, Robby, Rangga, Hasrul Sani, Bayu, Edhi, Rifi, Akbar, Fachmi, Jonathan, Lovidya, dan yang lainnya yang telah berjuang bersama penulis selama proses perkuliahan.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan Ibu, Bapak, saudara-saudara semua. Dan semoga penelitian ini membawa manfaat bagi para pembaca sekalian.

Depok, 25 Januari 2012

Febri Medina

## ABSTRAK

Nama : Febri Medina  
Program Studi : Akuntansi  
Judul : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi  
Keuangan Daerah Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Di  
Indonesia

Skripsi ini membahas pengaruh ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian, rasio pembiayaan hutang, kompleksitas pemerintahan, dan pendapatan per kapita terhadap tingkat aksesibilitas informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini meneliti transparansi informasi keuangan pada situs dengan mengambil 257 sampel pemerintah daerah di Indonesia yang dilihat berdasarkan ketersediaan dan aksesibilitas informasi tersebut. Penelitian ini diuji dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode regresi logistik untuk ketersediaan data informasi keuangan dan metode regresi berganda untuk aksesibilitas informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Hasil penelitian menggunakan metode logit menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian, dan kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan per kapita masyarakat berpengaruh negatif signifikan informasi keuangan pada situs. Selanjutnya Hasil penelitian menggunakan metode regresi berganda menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah dan kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Sedangkan *leverage* dan pendapatan per kapita masyarakat berpengaruh negatif signifikan informasi keuangan pada situs.

Kata Kunci: Transparansi, Pemerintah Daerah, Situs Resmi Pemerintah Daerah,  
Pengungkapan Sukarela, Informasi Keuangan

## ABSTRACT

Name : Febri Medina  
Program Study : Extention Accounting  
Title : Factors Affecting The Transparency of Local Government  
Financial Information on The Website In Indonesia

The purpose of this study is to examine effect of size, independency of local government, leverage, complexity of government, and income per capita. This study examines the transparency of local government financial information on the website for a sample of 257 local Government in Indonesia based on availability and accessibility of the information. This study tested using two methods, the logistic regression method for data availability of financial information and multiple regression methods to the accessibility of financial information on the local government official website. The study using logistic method found that size, independency ratio and complexity of government has positive relationship to the availability of financial information on the official website of the local government in Indonesia. Meanwhile, income per capita has significant negative effect to the accessibility of financial information on the official website in Indonesia. Then, the study using multiple regression method found that size and complexity of government has positive relationship to the accessibility of financial information on the local government official website. Leverage and income per capita have negative relationship to the accessibility of financial information on the web.

Keywords: Transparency, Local Government, Local Government Official Website, Voluntary Disclosure, Financial Information

## DAFTAR ISI

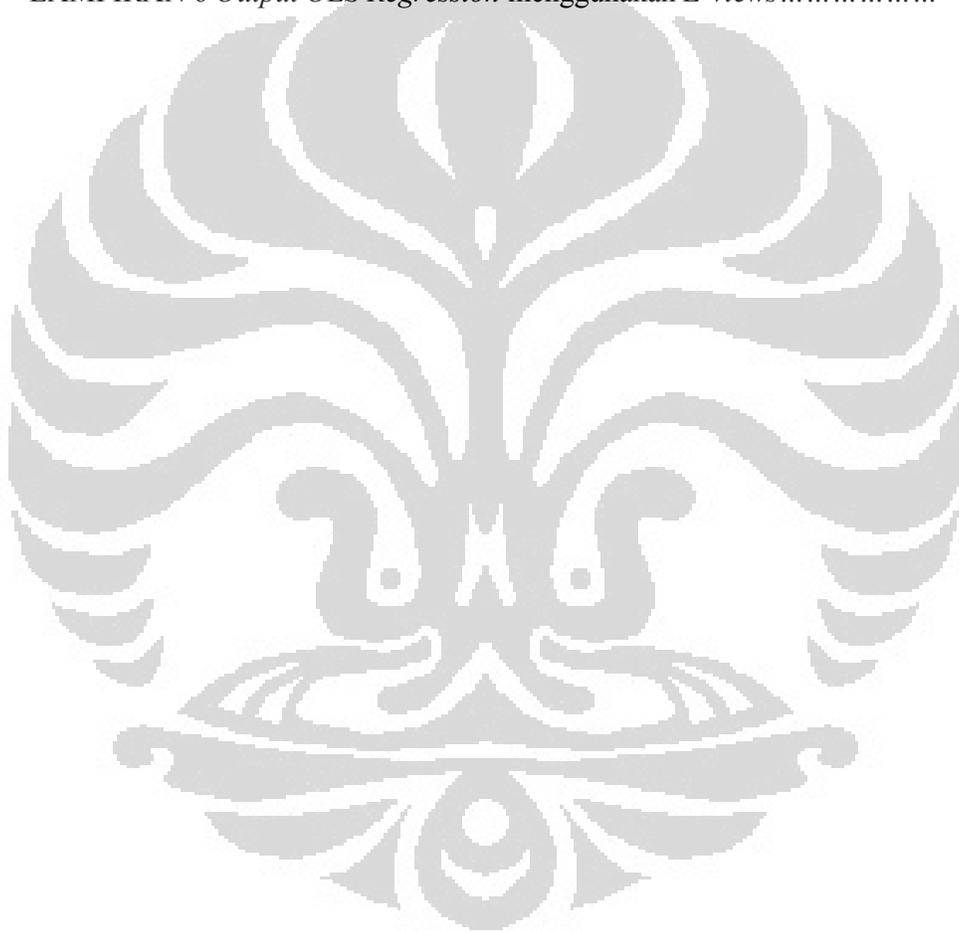
Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Persetujuan Publikasi.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Abstrak/Abstract.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Lampiran.....	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Tabel.....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN LITERATUR.....</b>	<b>9</b>
2.1 Transparansi.....	9
2.2 Kegunaan Information, Communication and Technology (ICT).....	10
2.3 <i>E-Government</i> .....	11
2.4 Sistem Informasi Keuangan Daerah.....	13
2.5 Pelaporan Keuangan.....	14
2.6 Teori Keagenan.....	16
2.7 Struktur Pemerintahan di Indonesia.....	17
2.8 Pengembangan Hipotesis.....	18
2.8.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Ketersediaan dan Tingkat Aksesibilitas Informasi Keuangan Daerah Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah.....	18
2.8.2 Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Ketersediaan dan Tingkat Aksesibilitas Informasi Keuangan Daerah Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah.....	19
2.8.3 Pengaruh Rasio Pembiayaan Hutang Terhadap Ketersediaan dan Tingkat Aksesibilitas Informasi Keuangan Daerah Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah.....	20
2.8.4 Pengaruh Rasio Kompleksitas Pemerintahan Terhadap Ketersediaan dan Tingkat Aksesibilitas Informasi Keuangan Daerah Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah.....	21

2.8.5	Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Ketersediaan dan Tingkat Aksesibilitas Informasi Keuangan Daerah Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah.....	23
2.9	Penelitian Sebelum.....	23
<b>BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....</b>		<b>28</b>
3.1	Kerangka Penelitian.....	28
3.2	Pengumpulan Data.....	29
3.2.1	Populasi dan Pengambilan Sampel.....	29
3.2.2	Sumber Data.....	30
3.3	Model Penelitian.....	30
3.4	Operasionalisasi Variabel.....	31
3.4.1	Variabel Dependen.....	31
1.	Ketersediaan IKD.....	31
2.	Aksesibilitas IKD.....	32
3.4.2	Variabel Independen.....	33
a.	Ukuran ( <i>Size</i> ).....	33
b.	Rasio Kemandirian (INDEP).....	33
c.	Rasio Pembiayaan Hutang.....	34
d.	Kompleksitas Pemerintahan.....	34
e.	Pendapatan Per Kapita.....	34
3.5	Statistik Deskriptif.....	35
3.6	Pengujian Model Penelitian I-Model Ketersediaan.....	35
3.6.1	Uji Asumsi Klasik.....	35
1.	Multikolinearitas.....	35
2.	Heteroskedastisitas.....	36
3.	Autokolerasi.....	36
3.6.2	Uji Kelayakan Model.....	36
1.	Menilai $-2 \text{ Log Likelihood}$ .....	37
2.	Koefisien Determinasi.....	37
3.	Uji <i>Hosmer and Lemehow Test</i> .....	37
3.6.3	Menilai Akurasi Model.....	38
3.6.4	Model Regresi yang dihasilkan.....	38
3.7	Pengujian Model Penelitian II-Model Aksesibilitas.....	38
3.7.1	Uji asumsi Klasik.....	38
1.	Multikolinearitas.....	39
2.	Heteroskedastisitas.....	39
3.	Autokolerasi.....	39
3.7.2	Evaluasi Hasil Regresi.....	39
1.	Uji $f$ (Uji Signifikansi Serentak).....	39
2.	Uji $R^2$ .....	40
3.	Uji $T$ .....	40
<b>BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>41</b>
4.1	Statistik Deskriptif.....	41
4.1.1	Statistik Deskriptif Variabel Dependen Model 1.....	41
4.1.2	Statistik Deskriptif Variabel Independen.....	46

4.2	Pengujian Model Penelitian I- <i>Availability</i> .....	49
4.2.1	Uji Asumsi Klasik: Multikolinearitas.....	49
4.2.2	Uji Kelayakan Model.....	50
	1. Menilai <i>-2Log Likelihood</i> .....	50
	2. Koefisien Determinasi ( <i>Negelkerke R Square</i> ).....	50
	3. Uji <i>Hosmer and Lamshow Test</i> .....	51
4.2.3	Menilai Akurasi Model.....	51
4.2.4	Model Regresi yang Dihasilkan.....	51
4.2.5	Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis.....	52
	1. Pengaruh Ukuran ( <i>Size</i> ) Pemerintah Daerah Terhadap Ketersediaan IKD Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah...	52
	2. Pengaruh Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Terhadap Ketersediaan IKD Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah.....	53
	3. Pengaruh Rasio Pembiayaan Hutang ( <i>Leverage</i> ) Terhadap Ketersediaan IKD Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah.....	54
	4. Pengaruh Kompleksitas Pemerintahan Terhadap Ketersediaan IKD Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah...	55
	5. Pengaruh Pendapatan Per Kapita Terhadap Ketersediaan IKD Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah.....	55
4.3	Pengujian Model Penelitian II- <i>Accsesibility</i> .....	56
4.3.1	Uji Asumsi Klasik.....	56
	1. Uji Multikolinearitas.....	56
	2. Uji Heterokedastisitas.....	57
4.3.2	Uji Kelayakan Model.....	58
	1. <i>F-Test</i> (Uji Signifikansi Serentak).....	58
	2. Uji $R^2$ (Koesifien Determinasi).....	58
4.3.3	Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis.....	58
	1. Ukuran ( <i>Size</i> ).....	58
	2. Rasio Kemandirian (INDEP).....	59
	3. Rasio Pembiayaan Hutang ( <i>Leverage</i> ).....	60
	4. Kompleksitas Pemerintahan ( <i>Type</i> ).....	61
	5. Pendapatan Per Kapita (INC).....	61
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....		63
5.1	Kesimpulan.....	63
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	63
5.3	Saran.....	64
5.4	Implikasi.....	65
<b>Daftar Referensi</b> .....		66

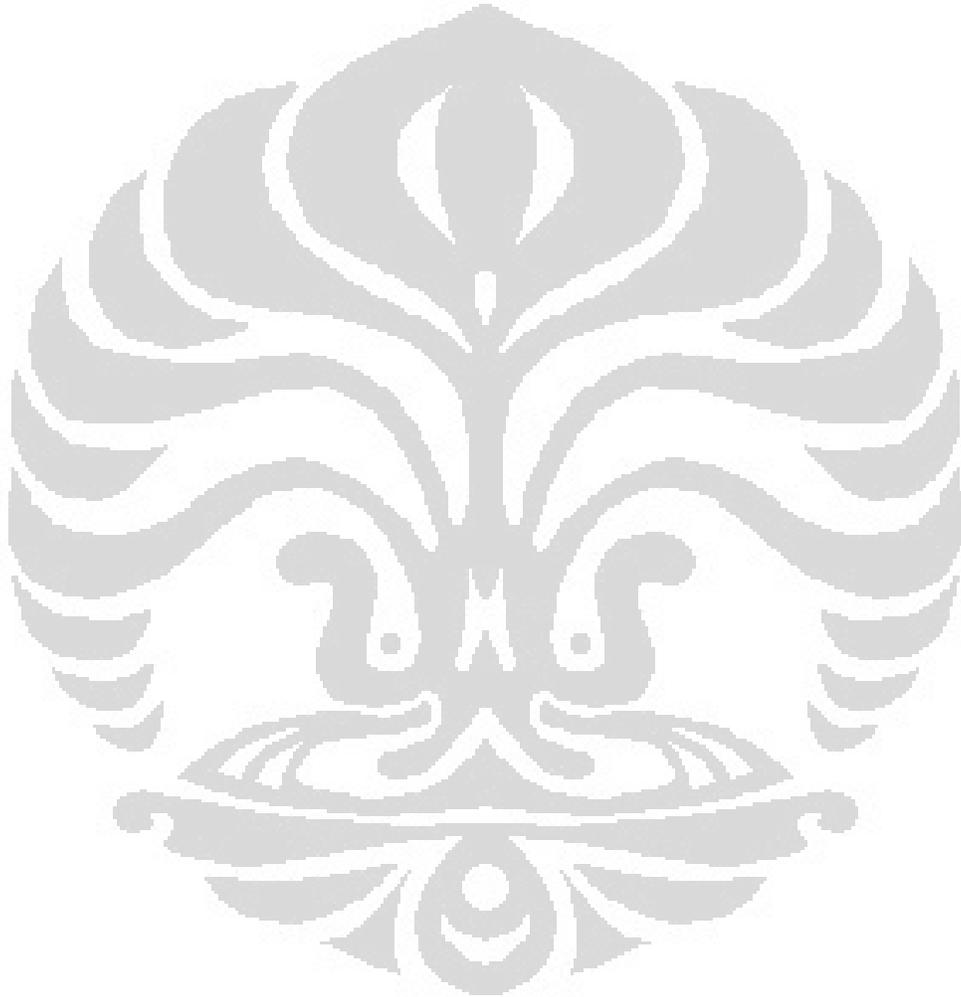
## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Daftar Sampel Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.....	70
LAMPIRAN 2 Daftar Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.....	74
LAMPIRAN 3 Data Sekunder.....	78
LAMPIRAN 4 Daftar <i>Outlier</i> yang Dibuang.....	87
LAMPIRAN 5 <i>Output</i> Regresi Logistik SPSS 18.0.....	88
LAMPIRAN 6 <i>Output OLS Regression</i> menggunakan <i>E-views</i> .....	95



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Model Penelitian.....	28
---	----



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Arah dan Signifikansi Penelitian Sebelumnya.....	25
Tabel 3.1	Ringkasan Pemilihan Sampel.....	29
Tabel 3.2	Deskripsi Variabel Dalam Model.....	31
Tabel 3.3	Ringkasan Operasional Variabel.....	35
Tabel 4.1	Frekuensi Ketersediaan IKD.....	41
Tabel 4.2	Ketersediaan IKD pada Situs Resmi 35 Pemda.....	41
Tabel 4.3	Nilai Indeks Aksesibilitas IKD pada Situs Resmi 35 Pemda.....	43
Tabel 4.4	Hasil Uji Beda Rata-Rata.....	45
Tabel 4.5	Statistik Deskriptif.....	47
Tabel 4.6	Korelasi <i>Pearson</i> .....	49
Tabel 4.7	<i>Omnibus Test of Model Coefficient</i> .....	50
Tabel 4.8	<i>Model Summary</i> .....	50
Tabel 4.9	<i>Hosmer and Lameshow Test</i> .....	51
Tabel 4.10	<i>Classification Table</i> .....	51
Tabel 4.11	<i>Variables in The Equation</i> .....	52
Tabel 4.12	Hasil Uji Regresi Berganda Setelah <i>Treatment</i> .....	57

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Transparansi merupakan isu utama dalam pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis membutuhkan akuntabilitas kepada publik guna meningkatkan transparansi dalam mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai anggaran dan keuangan. Peningkatan transparansi sangat dibutuhkan dalam rangka fungsi pengawasan, mencegah tindakan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang akan berakibat pada pemborosan.

Peningkatan transparansi dapat dilihat dari ketersediaan suatu informasi dan kemudahan dalam memperoleh informasi tersebut untuk publik. Perhatian terhadap peningkatan transparansi di Indonesia berkembang dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur seluruh jajaran pejabat publik menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Undang-undang ini menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyebarkan informasi publik dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Styles dan Tennnyson (2007) mengatakan bahwa internet adalah media yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan sarana yang paling *cost effective* bagi pemerintah untuk mempublikasikan informasi keuangannya dalam bentuk pelaporan *online*. Fenomena pengembangan praktek pelaporan *online* termotivasi oleh perkembangan *world wide web* sejak tahun 1994 dan internet menjadi media utama untuk pelaporan *online*. Di Indonesia, penggunaan internet akan sangat membantu dalam menyukseskan program *e-government* dalam membangun sistem informasi keuangan daerah. Internet menjadi teknologi yang berperan dalam proses penyediaan dan transfer informasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan kepada pihak lain, misalnya warga masyarakat, ataupun sebaliknya. Pemanfaatan internet dalam suatu institusi dapat membuat pekerjaan semakin efektif dan efisien.

Groff dan Pitman (2004) berpendapat bahwa internet telah menciptakan suatu kemampuan bagi entitas untuk menyebarkan berbagai jenis informasi (termasuk keuangan) hampir kepada siapapun yang memiliki akses. Penggunaan internet sebagai media penyebaran informasi yang dapat diakses bagi siapapun, hal ini juga dapat menunjukkan adanya suatu bentuk transparansi. Internet sebagai media penyebaran informasi cepat dan *real time*, jelas dapat menunjukkan kemungkinan peningkatan transparansi dalam setiap aspek. Kim *et al.* (2005) mengatakan dengan adanya teknologi, informasi-informasi penting dapat tersedia secara tepat dan cepat serta dapat memberikan kontribusi bagi proses administrasi yang lebih transparan. Moon (2002) berpendapat bahwa teknologi sangat berperan pada perkembangan dari sebuah organisasi itu sendiri dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Chadwick (2003) juga membenarkan bahwa internet bisa menawarkan kemungkinan peningkatan interaksi antara pemerintah daerah selaku administrasi publik dengan masyarakatnya.

Informasi keuangan yang dipublikasikan di media lain seperti internet merupakan pengungkapan sukarela yang tidak diwajibkan, melainkan sebuah pilihan (*alternative choice*) bagi Pemerintah yang ingin mengungkapkannya. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada sektor publik sudah banyak diteliti (Giroux, 2002; Gore, 2004; Zeld, 2007; Liestiani, 2008). Namun, untuk penelitian pada praktek pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yang mengungkap informasi keuangan pada media internet masih sangat minim, khususnya penelitian di lingkungan pemerintahan (Laswad *et al.*, 2005; Styles dan Tennyson, 2007; Rora, 2010).

Dalam perkembangan terakhir, internet menjadi alat untuk meneliti pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) atas pelaporan informasi keuangan pada lingkungan pemerintah daerah (Laswad *et al.*, 2005). Hasil penelitian Laswad *et al.* (2005) menunjukkan bahwa ukuran daerah, jenis pemerintah daerah, dan visibilitas pers (media) memiliki asosisasi terhadap pilihan dari pemerintah daerah untuk melaporkan informasi keuangannya di internet yang kemudian mendorong otoritas daerah untuk menjalankan pemerintahan dengan

lebih transparan. Selain itu, birokrasi untuk mendapatkan suatu informasi dapat dikikis dengan menggunakan media internet. Oleh karena itu pengungkapan informasi keuangan seharusnya dapat diakses dengan mudah oleh warganya.

Styles dan Tennyson (2007) meneliti sebanyak 300 sampel pemerintah lokal Amerika Serikat yang menyediakan data keuangan yang dilaporkan di internet pada situs resmi pemerintah lokal AS dan meneliti tingkat aksesibilitas data keuangan pada situs resminya. Styles dan Tennyson (2007) menguji beberapa variabel independen seperti ukuran, struktur pemerintahan, kualitas pengungkapan laporan keuangan, pendapatan per kapita, tingkat hutang dan kondisi finansial. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa ukuran, kualitas pengungkapan laporan keuangan dan pendapatan perkapita memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap ketersediaan data keuangan pada situs resmi pemerintah lokal di AS. Sedangkan, variabel independen ukuran, pendapatan perkapita, tingkat hutang dan kondisi finansial berpengaruh secara signifikan terhadap aksesibilitas data keuangan di internet pada situs resmi pemerintah lokal di AS.

Sedangkan di Indonesia Rora (2010) menguji bagaimana hubungan variabel-variabel bebas seperti rasio kinerja, rasio ketergantungan daerah, ukuran, kompleksitas pemerintahan dan belanja daerah terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada situs pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor rasio kinerja, kompleksitas pemerintahan, dan belanja daerah tidak memiliki pengaruh terhadap total pengungkapan pada situs pemerintah daerah. Sedangkan faktor lain seperti tingkat ketergantungan daerah dan ukuran memiliki pengaruh signifikan positif terhadap total pengungkapan pada situs pemerintah daerah.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Styles dan Tennyson (2007) di Amerika Serikat. Namun, penelitian ini hanya menggunakan 3 (tiga) dari 6 (enam) variabel independen yang dipakai dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Styles dan Tennyson (2007). Sedangkan 2 (dua) variabel lain yaitu rasio kemandirian dan kompleksitas pemerintahan menggunakan variabel yang dipakai dalam penelitian Rora (2010).

Perbedaan lain penelitian ini dengan penelitian Rora (2010) adalah bahwa pada penelitian ini menguji secara spesifik ketersediaan dan aksesibilitas data

keuangan (APBD/LKPD) untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah bersikap transparan atas informasi-informasi keuangan yang dipublikasikan pada situs resmi pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini yang dilakukan adalah menguji bagaimana pengaruh ukuran, tingkat kemandirian daerah, rasio pembiayaan hutang, kompleksitas pemerintahan dan pendapatan perkapita masyarakat terhadap tingkat transparansi yang di ukur dengan ketersediaan dan aksesibilitas informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada situs Pemerintah Daerah di Indonesia”.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah?
2. Apakah tingkat kemandirian daerah berpengaruh terhadap ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah?
3. Apakah rasio pembiayaan hutang (*leverage*) berpengaruh terhadap ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah?
4. Apakah kompleksitas pemerintahan berpengaruh terhadap ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah?
5. Apakah tingkat pendapatan perkapita masyarakat berpengaruh terhadap ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pemerintah daerah menjalankan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang diukur dengan ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses informasi keuangan pada situs pemerintah daerah kabupaten/kota. Pengkajian ini fokus terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses/memperoleh informasi keuangan daerah (APBD & LKPD) melalui media internet pada situs resmi pemerintah daerah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemandirian daerah terhadap ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah
3. Untuk mengetahui pengaruh rasio pembiayaan hutang (*leverage*) terhadap ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah
4. Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas pemerintahan terhadap ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah
5. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita masyarakat terhadap ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi para akademisi, Pemerintah Daerah, dan regulator. Adapun manfaat yang diberikan antara lain :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini bisa menjadi bahan literatur untuk pengembangan penelitian berikutnya tentang sektor publik, khususnya dengan menganalisa lebih

mendalam praktek pengungkapan sukarela atas informasi keuangan dan transparansi pemerintah serta *e-government*

2. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini pemerintah daerah mulai *concern* terhadap perkembangan dan kegunaan dari IT dan internet. penelitian ini diharapkan dapat menjadi *feedback value* untuk perkembangan daerahnya serta memotivasi pemerintah daerah lain untuk mengembangkan situs resminya menggunakan sarana dalam penyampaian informasi.

3. Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan kepada regulator, terutama mengenai pentingnya pengungkapan informasi di dalam media internet untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan semakin berkembangnya kemampuan IT dan internet di Indonesia.

4. Publik

Dengan penelitian ini, masyarakat dapat mengetahui pemerintah daerah mana saja yang memberikan informasi keuangannya pada situs dan dapat melihat sejauh mana transparansi pengelolaan keuangan daerah pada situs.

### **I.5 Ruang Lingkup**

Kajian yang dilakukan dalam penelitian ini terbatas pada analisis tingkat transparansi yang dilihat dari visibilitas/ketersediaan dan aksesibilitas/kemudahan dalam mengakses informasi keuangan pada situs pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Akan tetapi, dalam penelitian ini akan diambil sampel dari tiap-tiap pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang merepresentasikan penelitian ini. Pemerintah Kabupaten/Kota yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah pemerintah daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Laporan Keuangan tahun 2009 serta memiliki situs resmi yang dapat diakses setiap waktu.

## **I.6 Sistematika Penulisan**

Dalam skripsi ini, pembahasan dibagi menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan secara singkat latar belakang permasalahan yang berisikan alasan-alasan yang melatarbelakangi penelitian ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, mafaat penelitian, ruang lingkup serta sistematika penulisan.

### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Pada bab ini akan menguraikan teori-teori yang terkait transparansi, kegunaan ICT, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), pelaporan keuangan, teori keagenan, struktur pemerintahan di Indonesia, penelitian sebelumnya dan pengembangan hipotesa yang akan diuji serta hubungannya dengan praktek transparansi yang dilihat berdasarkan ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Indonesia.

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

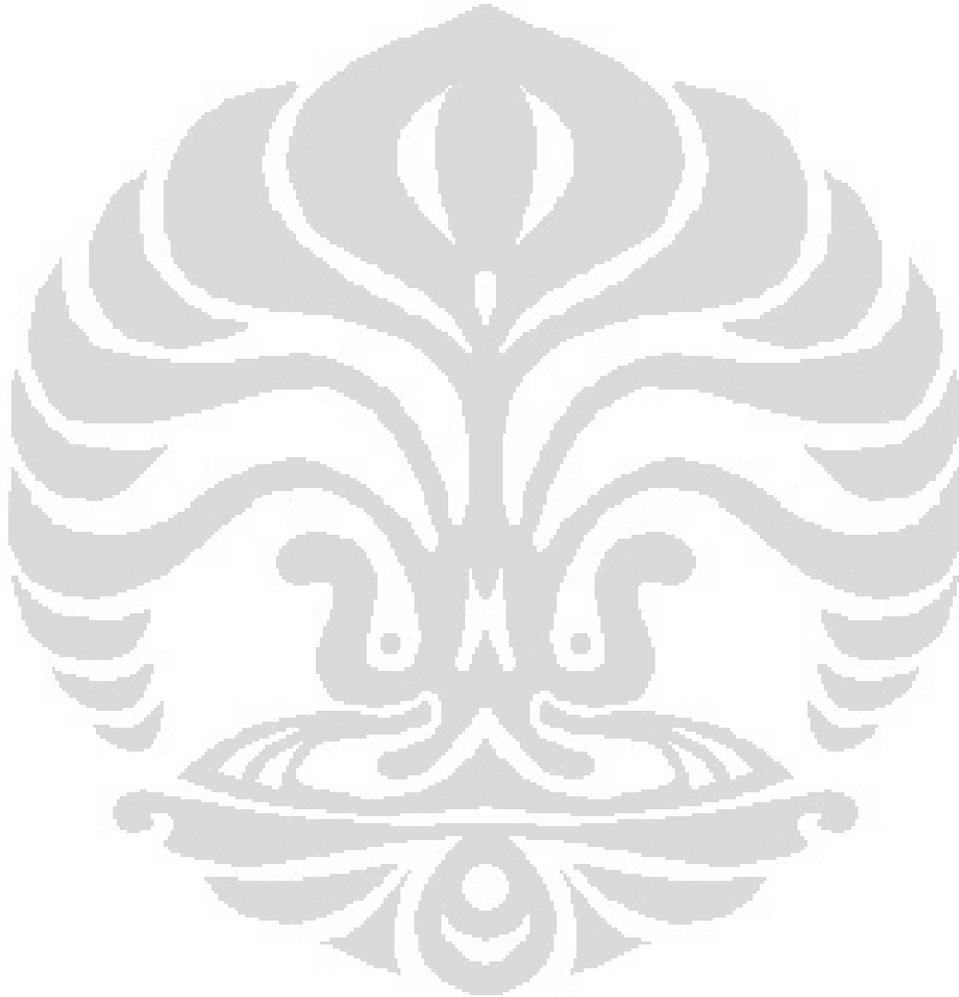
Bagian ini membahas desain penelitian yang digunakan dalam penelitian kerangka penelitian, pengumpulan data, sumber data, model penelitian, pengujian hipotesis penelitian, dan operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian

### **BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang analisis hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang ingin diteliti melalui penjelasan data, pengujian statistik, dan analisa terhadap hasil penelitian. Interpretasi dari penelitian akan memberikan jawaban atas permasalahan dari penelitian ini.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab terakhir ini berisi ulasan pembahasan penelitian sesuai dengan hasil analisa bab IV, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan serta bahan masukan bagi penelitian selanjutnya di masa mendatang.



## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1 Transparansi

Kemudahan dalam mengakses informasi yang dimiliki oleh pemerintah merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian bagi masyarakat. Hal ini disebabkan adanya keterkaitan antara transparansi dan isu-isu mengenai etika, korupsi, penyimpangan administrasi dan akuntabilitas (Piotrowski dan Bertelli, 2010). Transparansi merupakan salah satu prasyarat akuntabilitas administratif kepada publik. Transparansi merupakan salah satu elemen kunci di dalam *good governance* yang berupa penjaminan akses dan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan publik.

Keterbukaan informasi diharapkan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan pemerintah dibuat berdasarkan pada preferensi kebutuhan publik (Arifianto, 2005). Menurut *Asian Development Bank* (1999) dalam Arifianto (2005) transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan publik dapat mengurangi ketidakpastian dan membantu mencegah korupsi oleh aparat pemerintah. Folscher (2000) mengungkapkan beberapa keuntungan dari adanya transparansi:

1. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian yang memberikan kontribusi pada stabilitas fiskal dan makroekonomi sehingga penyesuaian-penyesuaian dikemudian hari dapat diminimalisir.
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Legislatif, media dan masyarakat dapat melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintah lebih baik jika mereka mempunyai informasi tentang kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penerimaan/pengeluaran pemerintah. Para pejabat publik akan berlaku lebih bertanggungjawab jika keputusan yang diambil dilakukan secara terbuka/transparan untuk publik dan dapat mencegah adanya korupsi, kolusi dan nepotisme.

3. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih erat, misalnya masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah dan bahkan mendukung kebijakan tersebut.
4. Meningkatkan iklim investasi. Pemahaman yang jelas terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah akan mengundang investor baik dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi lebih banyak.

Prinsip transparansi dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu komunikasi kepada publik oleh pemerintah dan hak masyarakat untuk mengakses informasi. Keduanya dapat terpenuhi apabila pemerintah bersedia untuk terus memperbaiki kinerjanya menuju pemerintahan dan tata kelola yang lebih baik. Media juga memiliki peran yang penting bagi transparansi pemerintah. Perannya dapat diartikan sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi kepada publik maupun untuk menjelaskan berbagai informasi yang relevan dan juga sebagai “*watchdog*” atas setiap tindakan pemerintah terhadap perilaku menyimpang dari otoritas pemerintahan.

## **2.2 Kegunaan *Information, Communication and Technology (ICT)***

Informasi, komunikasi dan teknologi mengalami kemajuan pesat, terutama dalam beberapa tahun belakangan ini. Kemajuan ini tentunya didukung dengan berkembangnya teknologi yang hadir dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan sangat diperlukan untuk membantu meringankan pekerjaan. Perkembangan pada ICT juga memberikan pengaruh besar bagi hubungan antara pemerintah dan warga negaranya terutama dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan pelayanan yang lebih baik. Teknologi, informasi dan komunikasi hadir sebagai salah satu solusi untuk mengatasi hambatan keterbatasan akses antar wilayah (Hartono, 2010).

Moon (2002) mendeskripsikan fungsi dan kegunaan teknologi berbasis web yang dapat dilihat berdasarkan 2 (dua) kategori, eksternal dan internal. Secara internal, penggunaan *web* dan teknologi informasi dan komunikasi lainnya memiliki potensi yang menjajikan sebagai alat manajerial yang efektif dan efisien untuk dapat mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan mengelola sejumlah data dan informasi. Dengan menggunakan fungsi *upload* dan *download*, informasi dan

data terkini (*up-to-date*) dapat disajikan dan pada internet secara *real time*. Secara eksternal, teknologi berbasis *web* juga dapat memfasilitasi hubungan pemerintah dengan masyarakat (salah satunya terkait dengan masalah pelayanan kepada masyarakat dan aktifitas politik) dan unit pemerintahan lainnya serta aktivitas bisnis.

Menurut Nordiawan dkk (2007) indikator kesuksesan pada organisasi pemerintahan tidak hanya diukur dari saldo laba saja, tetapi perlu dilihat dari mutu pelayanan dan efisiensi dari penggunaan dana yang tersedia. Untuk dapat melakukan efisiensi terhadap penggunaan dana yang dikelola oleh pemerintah daerah salah satunya adalah dengan menggunakan internet sebagai sarana pendukung pemerintah daerah. Styles dan Tennyson (2007) juga berpendapat bahwa internet merupakan salah satu cara bagi pemerintah untuk dapat mengurangi biaya (*cost effective*) dalam menyebarkan informasi dengan cepat dan nyaman. Dengan adanya internet memungkinkan pihak pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan yang terpadu dengan cepat dan tanggap terhadap respons akan kebutuhan masyarakat. Sarana internet ini juga menghilangkan unsur birokrasi yang rumit sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk berkomunikasi dengan *agent* (pemerintah).

### 2.3 *E-Government*

*Electronic government* merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (*information, communication and technology*) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah serta stafnya, sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakatnya (Hartono, 2010).

Secara umum, *e-government* memiliki lima aspek utama: (1) interaksi antara lembaga pemerintah, (2) pelayanan berbasis *web/internet*, (3) *e-commerce*, (4) demokrasi secara digital untuk pertanggungjawaban pemerintah yang lebih transparan, dan (5) *e-finance* (Moon, 2002; Wang dan Rubin, 2004). Salah satu fokus utama dari *e-government* adalah legitimasi negara dan hubungannya dengan masyarakat serta supremasi hukum, bersama-sama dengan adanya lingkup *e-*

*democracy* dan *e-government* (Brown, 2005). Kesiapan menuju keberhasilan *e-Government* menurut Heeks (2001) dalam Hartono (2010) berkaitan dengan:

1. **Infrastruktur legal.**  
Perlu adanya perangkat hukum untuk menangkal kejahatan digital, serta melindungi privasi, pengamanan data/informasi dan transaksi digital perorangan, perusahaan dan lembaga pemerintah.
2. **Infrastruktur kelembagaan.**  
Perlu adanya instansi khusus yang menangani *e-Government* yang memberikan layanan informasi kepada masyarakat termasuk layanan digital.
3. **Infrastruktur SDM.**  
Sistem kepegawaian perlu dikembangkan agar mampu menarik SDM yang berkualitas dalam bidang telematika untuk ikut dalam pengembangan *e-Government* milik pemerintah.
4. **Infrastruktur teknologi.**  
Meskipun teknologi yang diperlukan relative mahal, tapi peluang kerjasama dengan swasta perlu dikembangkan dalam membangun infrastruktur teknologi untuk mendukung *e-Government*.
5. *Support, Capacity, Value*
6. *Political environment, Leadership, Planning, Stakeholder, Transparency, Budgets, Technology, Innovation.*

Gupta *et al* (2008) dalam Rora (2010) menyatakan implementasi dari pelaksanaan *e-government* dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi pemerintah:

1. Meningkatkan efisiensi, meningkatkan akses terhadap pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan *citizen empowerment*.
2. Menurunkan biaya dan waktu untuk melakukan pelayanan
3. Memberikan keuntungan stratejik seperti meningkatkan proses pengambilan keputusan melalui arus informasi, meningkatkan interaksi penduduk dengan institusi pemerintahan, bisnis dan industri, meningkatkan kekuatan masyarakat untuk memaksa pemerintah memiliki hubungan yang lebih baik dengan sektor swasta dan meningkatkan kemampuan untuk memberikan efekterhadap *organizational change management*.

## 2.4 Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sistem adalah satu set komponen-komponen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan (O'brien, 2011). Sistem biasanya terdiri dari beberapa subsistem yang masing-masing melakukan fungsi khusus yang penting untuk mendukung sistem yang lebih besar. O' Brien (2011) secara sederhana mendefinisikan sistem informasi adalah suatu kombinasi yang terorganisir terdiri dari orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi dan sumber data serta alat kebijakan dan prosedur untuk menyimpan, mengambil, mengubah dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Wilkinson (2000) menyatakan sistem informasi dimaksudkan untuk menyediakan informasi kepada spesifik *users*.

Sedangkan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel (<http://www.depdagri.go.id>). UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah pasal 103 yang menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah data yang terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah dituntut untuk membuka akses kepada masyarakat secara luas atas informasi keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan informasi keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya.

Pasal 101 menyebutkan tujuan pemerintah dalam rangka menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional adalah:

1. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional
2. Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional
3. Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti dana perimbangan, pinjaman daerah dan pengendalian defisit anggaran
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan desentralisasi daerah, dan defisit anggaran daerah

Untuk menindaklanjuti pelaksanaan dari UU Nomor 33 tahun 2004 pemerintah mengeluarkan PP Nomor 56 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam PP tersebut informasi keuangan daerah adalah informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang harus disampaikan oleh pemerintah daerah dan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi keuangan yang telah diolah dan didokumentasikan haruslah dapat disajikan kepada masyarakat. Informasi tersebut juga berguna sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Informasi keuangan daerah yang tertuang dalam PP Nomor 56 tahun 2005 pasal 4 pada pelaksanaannya disampaikan oleh daerah kepada pemerintah mencakup:

1. APBD dan realisasi APBD provinsi, kabupaten dan kota
2. Neraca daerah
3. Laporan arus kas
4. Catatan atas laporan keuangan daerah
5. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan
6. Laporan keuangan perusahaan daerah, dan
7. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah

Informasi keuangan tersebut harus disampaikan kepada menteri keuangan dan menteri dalam negeri. Penyampaian informasi keuangan daerah dilakukan secara berkala melalui dokumen tertulis dan media lainnya. Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat. Sarana yang paling efisien dalam menyampaikan informasi keuangan adalah dengan menggunakan internet sebagai media penyampaiannya. Pemerintah daerah dapat menggunakan situs resminya sebagai media publikasi informasi keuangan.

## **2.5 Pelaporan Keuangan**

Pelaporan keuangan merupakan suatu bentuk pengungkapan informasi keuangan. Pengungkapan berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan (Ghozali dan Chariri, 2007). Tujuan pelaporan keuangan

diupayakan mempunyai cakupan yang luas agar memenuhi berbagai kebutuhan para pemakai dan melayani kepentingan umum dari berbagai pemakai yang potensial, bukan hanya untuk kebutuhan khusus kelompok tertentu saja (Kieso, Weygandt, dan Warfield, 2007). Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara. FASB mengartikan pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian (*means of communication*) informasi tentang segala kondisi dan kinerja entitas terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui laporan keuangan. Singkatnya, pelaporan keuangan lebih luas dari pada laporan keuangan (Bastian, 2006).

Dengan demikian, pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi tentang keuangan pemerintahan daerah disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara. Unsur-unsur di dalam informasi keuangan daerah berdasarkan PP No. 56 tahun 2005 yang dibahas dalam penelitian ini adalah LKPD dan APBD. APBD terdiri atas:

1. Anggaran Pendapatan, diantaranya
  - a. Pendapatan Asli Daerah: pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan lain-lain
  - b. Dana Perimbangan: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
  - c. Lain-lain pendapatan yang sah
2. Anggaran belanja, diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Anggaran belanja digunakan untuk membiayai penyelenggaraan tugas pemerintah daerah
3. Pembiayaan, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan  
Peraturan mengenai APBD ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan

atas Laporan Keuangan. Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh pemerintah daerah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 31 dan UU Nomor 1 tahun 2004. UU Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa penyampaian LKPD oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## 2.6 Teori Keagenan

Hubungan keagenan muncul ketika satu pihak (*principal*) memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain (*agent*) untuk melakukan pengambilan keputusan. Teori keagenan sendiri muncul berdasarkan pemikiran bahwa pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer perusahaan (*agent*) memiliki kepentingan yang berbeda (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam penelitian ini agen adalah pemerintah yang memiliki otoritas atas suatu daerah (kabupaten/kota), sedangkan prinsipal adalah masyarakat. Agen-agen (pemerintah daerah) yang ditunjuk sebagai delegasi dari pemilik (prinsipal/ masyarakat) ini adalah agen yang dipercaya untuk mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Akan tetapi, masyarakat tentunya tidak dapat mengawasi seluruh tindakan yang dilakukan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah selaku agen, sehingga dapat menimbulkan agen yang akan mengambil keputusan yang hanya menguntungkan kesejahteraan mereka saja tanpa menghiraukan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara tradisional, hubungan antara pemerintah dan warga telah dianggap di bawah teori prinsipal-agen (keagenan) yang telah digunakan secara luas dalam administrasi publik untuk memeriksa masalah yang terkait dengan manajemen dan administrasi di negara yang berlandaskan prinsip desentralisasi (Thompson, 1999). Namun, permasalahan yang timbul dalam hubungan *principal-agent* secara inheren terkait ketersediaan informasi yang diungkap oleh *agent* (Alvarez dan Hall, 2006). Dengan demikian, di bawah *principal-agent* upaya teori telah dibuat untuk mengidentifikasi insentif-insentif yang timbul pada beberapa pengungkapan di sektor publik (Gang, 1988).

Masalah keagenan menimbulkan informasi asimetri antara pemerintah selaku agen dan masyarakat sebagai principal. Mohamad dkk. (2004) dalam Mulyana (2006) berpendapat bahwa akuntabilitas muncul sebagai jawaban terhadap permasalahan *information asymmetry*. Teori asimetri informasi beranggapan bahwa banyak terjadi kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang mempunyai akses langsung atas informasi yang dimilikinya dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada di luar manajemen. Scott (1997) menjelaskan bahwa kemampuan bertahan suatu organisasi ditentukan oleh bagaimana menciptakan informasi yang terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

## **2.7 Struktur Pemerintahan Indonesia**

Struktur pemerintahan Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan daerah. Pembagian struktur daerah ini umumnya diperlukan untuk melindungi dan melayani kebutuhan warga negaranya (Nordawan, 2007). Pemerintah daerah terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab atas sumber daya yang berasal dari dana-dana masyarakat yang dikelola olehnya. Berdasarkan pasal 1 UU Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004, pemerintah daerah di Indonesia dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan otonomi daerah berdampak pada perimbangan/pembagian keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 21 tentang hak-hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintahan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang. Hubungan tersebut meliputi hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang harus dilaksanakan secara adil dan jelas.

## **2.8 Pengembangan Hipotesis**

### **2.8.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Ketersediaan dan Tingkat Aksesibilitas Informasi Keuangan Daerah Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah**

Ukuran pemerintah daerah biasanya menjadi faktor yang paling banyak diteliti dalam mencari besarnya tingkat pengungkapan wajib (*mandatory*) maupun sukarela (*voluntary*). Terdapat beberapa argumen dalam penelitian-penelitian terdahulu mengenai ada tidaknya asosiasi antara ukuran pemerintah daerah dengan pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR) pada situs resminya. Hasil penelitian Laswad *et al.* (2005) tidak menemukan adanya hubungan antara ukuran pemda dengan IFR. Namun Serrano *et al.* (2008) menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara ukuran pemerintah daerah dengan pengungkapan sukarela informasi keuangan via internet (Serrano *et al.*, 2008).

Piotrowski dan Bertelli (2010) berpendapat bahwa semakin banyak sumber daya pemerintah daerah, semakin besar kemungkinan pemerintah daerah untuk berinvestasi ke sistem infrastruktur yang akan memberikan transparansi. Contoh-contoh dari proyek infrastruktur tersebut termasuk *web server*, sistem manajemen dokumen dan peralatan untuk *video conferencing*. Sumber daya yang besar dapat juga dilihat dari total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Berdasarkan analisis di atas, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut:

**H1a:** Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah

Styles dan Tennyson (2007) meneliti tingkat ketersediaan data keuangan CAFR pada situs resmi pemerintah di Amerika Serikat. Mereka membuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap aksesibilitas data keuangan CAFR pada situs resmi pemerintah lokal AS. Pemerintah lokal dengan ukuran yang lebih besar cenderung memberikan kemudahan dan kenyamanan akses data keuangan CAFR pada situs resminya. Berdasarkan analisis diatas, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut:

**H1b:** Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap aksesibilitas informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah

### **2.8.2 Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Ketersediaan dan Tingkat Aksesibilitas Informasi Keuangan di Dalam *Internet***

Tingkat kemandirian menunjukkan kemampuan daerah dari sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai pengeluaran operasional daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian Laswad *et al.* (2005) menunjukkan kekayaan asli pemerintah daerah berhubungan secara positif signifikan terhadap pengungkapan yang lebih atas Informasi keuangan pada situs resminya. Berdasarkan penelitian Laswad *et al.* (2005) besarnya kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pada daerah menunjukkan kinerja pemerintahnya yang baik. Kinerja pemerintah yang baik akan menunjukkan kualitas dari manajemen pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah yang memiliki kualitas manajemen yang baik cenderung untuk mengungkapkan informasi yang lebih banyak dan menggunakan sistem yang dapat meningkatkan kualitas dari pemerintah daerah tersebut seperti dengan menyediakan informasi pada situs resminya. Berdasarkan analisis diatas, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut:

**H2a:** Tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi keuangan di situs resmi pemerintah daerah

Christiaens (1999) berpendapat bahwa kekayaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah pemerintah daerah berhubungan positif dengan meningkatnya pengungkapan karena memberikan sinyal dari kualitas kepala daerah atas pengelolaan keuangan yang baik. Semakin tinggi rasio pendapatan asli daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat kemandirian pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Namun, Pemerintah daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang rendah menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang kurang baik. Hal ini dapat menjadi alasan pemerintah daerah untuk membatasi akses informasi keuangan daerah kepada masyarakat (Laswad *et al.*, 2005). Berdasarkan analisis diatas, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut:

**H2b:** Tingkat kemandirian daerah berpengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan di situs resmi pemerintah daerah

### **2.8.3 Pengaruh Rasio Pembiayaan Hutang Terhadap Ketersediaan dan Tingkat Aksesibilitas Informasi Keuangan di Situs Resmi Pemerintah Daerah**

Styles & Tennyson (2007) berpendapat bahwa dengan melakukan pembiayaan terhadap pengeluaran-pengeluaran pemerintah saat ini akan memberikan dampak pada kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan program-program terpadu bagi masyarakat dimasa yang akan datang. Namun besaran dari hutang tidak boleh melebihi jumlah dari modal yang dimiliki. Hubungan keagenan antara otoritas daerah dan pemerintah pusat (kreditur) memberikan dampak pada besarnya tingkat pengungkapan. Kreditur cenderung memonitor para debiturnya dalam pengelolaan keuangan. Pengungkapan informasi keuangan melalui media tradisional maupun lainnya (internet) dapat memfasilitasi kreditur untuk mengawasi kinerja pemerintah (Zimmerman, 1977; Ingram, 1984; Gore, 2004). Berdasarkan analisis diatas, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut:

**H3a:** Rasio pembiayaan hutang berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan di situs resmi pemerintah daerah

Temuan Gore (2004) menunjukkan bahwa *debt holders* memiliki insentif yang dominan atas biaya politik dan peraturan yang terkait dengan tidak memberikan pengungkapan. Styles dan Tennyson (2007) berpendapat bahwa pemerintah menggunakan hutang untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, penggunaan hutang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mempertanggungjawabkan hutang yang dimiliki, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengungkapkan informasi keuangannya dengan lebih transparan. Styles dan Tennyson (2007) mengatakan media yang dapat diakses dan dijangkau dengan mudah untuk alat kontrol terhadap pemerintah daerah adalah dengan menggunakan internet. Diskusi ini mengarah pada hipotesis berikut:

**H3b:** Rasio pembiayaan hutang berpengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan di situs resmi pemerintah daerah

#### **2.8.4 Pengaruh Tingkat Kompleksitas Pemerintahan Terhadap Ketersediaan dan Tingkat Aksesibilitas Informasi Keuangan di Dalam Internet**

Permasalahan yang dihadapi pemerintah kota cenderung lebih kompleks dibandingkan kabupaten. Hal ini dikarenakan dari jumlah masyarakat yang memiliki keberagaman latar belakang sosial dan pendidikan. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian yang lebih dalam melayani kebutuhan warganya. Semakin kompleks permasalahan di suatu daerah, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi warganya. Pemerintah daerah perlu untuk membangun suatu sistem yang terintegrasi karena pemerintah daerah mengemban tanggung jawab yang besar. Untuk itu diperlukan adanya transparansi dalam setiap tindakan pemerintah daerah, termasuk transparansi dalam mengelola keuangan daerah. Internet

merupakan media yang paling efisien dalam memberikan pelayanan kepada penduduk di suatu daerah. Karena internet dapat menjangkau populasi penduduk yang lebih besar dalam memberikan pelayanan bagi pemerintah daerah.

Laswad *et al.* (2005) menyatakan bahwa tipe pemerintahan yang berbentuk kota yang penduduknya lebih besar dan beragam, situs pemerintah daerahnya lebih canggih dan lebih banyak informasi yang diungkap pada situsnya. Laswad *et al.* (2005) memperoleh bukti bahwa tipe pemerintahan berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Evans dan Patton (1987) menemukan bahwa populasi adalah variabel yang signifikan dalam pengungkapan keuangan publik, semakin besar populasi pada suatu daerah maka semakin besar pula tekanan yang diberikan kepada pemerintah kota yang bertanggung jawab untuk membuat informasi yang tersedia untuk publik. Daerah yang populasinya banyak dan memiliki beragam latar belakang sosial, maka permasalahan pemerintah daerahnya semakin kompleks. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut

**H4a:** Tingkat kompleksitas pemerintahan berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan di situs resmi pemerintah daerah

Styles dan Tennyson (2007) berpendapat bahwa kota-kota besar dengan jumlah penduduk yang lebih besar dengan tingkat pelayanan yang lebih tinggi cenderung akan menghasilkan sebuah *website* pemerintah yang lebih canggih. Jumlah penduduk yang lebih banyak akan memberikan dampak kecenderungan pada pemerintahan yang lebih kompleks. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu meningkatkan pelaporan akuntansi yang memadai dan teknologi informasi yang lebih canggih. Sebuah *website* yang lebih canggih akan menggabungkan material desain dan presentasi yang dapat memberikan tingkat aksesibilitas yang lebih tinggi kepada pengunjung *website*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut

**H4b:** Tingkat kompleksitas pemerintahan berpengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan di situs resmi pemerintah daerah

### 2.8.5 Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Ketersediaan dan Tingkat Aksesibilitas Informasi Keuangan di Dalam Internet

Tingkat pendapatan perkapita daerah merupakan ukuran dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Pendapatan perkapita mencerminkan perbandingan tingkat produktifitas tiap penduduk di suatu wilayah. Semakin besar proporsi pengguna internet, semakin besar pula potensi masyarakat untuk menggunakan layanan internet sebagai media untuk memperoleh informasi keuangan pemerintah daerahnya (Serrano et al, 2008). Semakin tinggi pendapatan perkapita daerah semakin tinggi pula *political monitoring* oleh masyarakat dan semakin tinggi permintaan informasi yang disediakan pada situs untuk mengukur kinerja pemerintah daerah (Styles & Tennyson, 2007). Berdasarkan analisis diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H5a:** Tingkat kesejahteraan masyarakat daerah berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi keuangan di situs resmi pemerintah daerah

Daerah dengan pendapatan perkapita yang lebih tinggi memiliki permintaan akan akuntabilitas publik yang lebih tinggi (Ingram, 1984; Giroux & McLelland, 2003). Semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam mengadopsi teknologi terbaru untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Dengan tingkat adopsi teknologi informasi yang lebih tinggi, secara perlahan menstimulasi pemerintah daerah untuk menawarkan layanan dan informasi yang lebih canggih melalui media internet.

**H5b:** Tingkat kesejahteraan masyarakat daerah berpengaruh positif terhadap aksesibilitas informasi keuangan di situs resmi pemerintah daerah

## 2.9 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terkait *voluntary disclosure* pemerintah daerah melalui media internet telah banyak diteliti (Groff dan Pittman, 2004; Laswad *et al.*, 2005; Styles

dan Tennyson, 2007; Piotrowski dan Bertelli, 2010; Jorge *et al.*, 2011). Reformasi pelaporan keuangan sektor publik di Selandia Baru pada awal tahun 1999 mendorong penelitian tentang pengungkapan sukarela via internet yang dilakukan oleh Laswad *et al.* (2005). Mereka meneliti 86 (delapan puluh enam) *website* pemerintah lokal Selandia Baru yang terdiri dari 12 pemerintah regional/provinsi, 15 pemerintah kota dan 59 *district council*. Tujuan dari penelitian mereka adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela Internet Financial Reporting (IFR) diantara pemerintah lokal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan IFR dalam penelitiannya adalah kompetensi politik, ukuran pemerintah lokal, *leverage*, kekayaan pemerintah lokal, *press visibility*, jenis *council*. Hasil dari penelitiannya menunjukkan *leverage*, kekayaan pemerintah lokal, *press visibility*, dan jenis/tipe *council* memiliki hubungan dengan praktek IFR pada pemerintah lokal Selandia Baru.

Styles dan Tennyson (2007) melakukan penelitian terhadap ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses data keuangan pemerintah lokal pada internet. Mereka mengambil 300 sampel pemerintah daerah di Amerika Serikat dengan berbagai ukuran daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan ketersediaan data keuangan berpengaruh terhadap ukuran daerah, tingkat pendapatan perkapita dan tingkat pengungkapan. Sementara itu populasi, pendapatan perkapita dan tingkat hutang berpengaruh positif terhadap aksesibilitas atau kemudahan dalam mengakses data keuangan.

Piotrowski & Bertelli (2010) mencoba untuk menganalisis bagaimana kompetensi politik, ukuran pemerintah daerah, *budget per capita*, dan *credit rating* pemda dalam hubungannya dengan transparansi daerah. Penelitian ini dilakukan di kota New Jersey dengan cara survei kuesioner dan melihat faktor-faktor penentu transparansi berdasarkan literatur pada permintaan individu untuk transparansi.

Rora (2010) menganalisis tingkat pengungkapan sukarela pada situs resmi pemerintah daerah. Ia mengukur tingkat pengungkapan sukarela berdasarkan jumlah pengungkapan konten, presentasi pengungkapan dan total pengungkapan pada situs resmi pemerintah daerah. Sedangkan kinerja pemerintah, tingkat ketergantungan dan karakteristik pemerintah daerah merupakan faktor-faktor yang

mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela. Hasilnya, dapat diketahui bahwa hanya tingkat ketergantungan daerah saja yang mempengaruhi tingkat pengungkapan pada konten situs. Sedangkan tingkat presentasi pengungkapan hanya dipengaruhi oleh kompleksitas pemerintahan dan tingkat ketergantungan daerah. Untuk total keseluruhan pengungkapan pada situs pemerintah daerah hanya dipengaruhi oleh tingkat ketergantungan daerah.

Jorge *et al.* (2011) meneliti hubungan antara transparansi keuangan pemerintah daerah Portugal dan Italy dengan kompetensi politik, orientasi politik, *political engagement*, rata-rata umur masyarakat, tingkat pendidikan, pendapatan masyarakat populasi, jumlah populasi dan tingkat kemandirian pemerintah daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hanya jumlah populasi yang berhubungan positif signifikan terhadap transparansi keuangan di dua Negara tersebut.

**Tabel 2.1 Arah dan Signifikansi Penelitian Sebelumnya**

<b>Peneliti</b>	<b>Variabel Dependen</b>	<b>Variabel independen</b>	<b>Hasil</b>
Laswad <i>et al.</i> (2005)	Internet Financial Reporting (IFR)	Kompetensi politik, ukuran, <i>leverage, wealth</i> , visibilitas pers, tipe pemda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya hubungan yang positif signifikan IFR dengan: <i>leverage, wealth</i>, dan visibilitas pers.</li> <li>2. Adanya hubungan yang negatif signifikan IFR dengan: tipe pemda</li> <li>3. Ukuran dan kompetensi politik tidak memiliki hubungan signifikan dengan IFR</li> </ol>

<p>Styles dan Tennyson (2007)</p>	<p><i>Availability</i> dan <i>accessibility</i> CAFR</p>	<p>Ukuran daerah, struktur pemda, kualitas <i>accounting disclosure</i>, pendapatan per kapita, tingkat hutang, kondisi finansial</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya hubungan yang positif signifikan ketersediaan CAFR dengan: ukuran daerah, kualitas <i>accounting disclosure</i>, pendapatan per kapita dan tingkat hutang</li> <li>2. Adanya hubungan yang positif signifikan aksesibilitas CAFR dengan: Ukuran daerah, pendapatan per kapita, dan tingkat hutang.</li> </ol>
<p>Rora (2010)</p>	<p><i>Voluntary disclosure:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengungkapan konten</li> <li>2. presentasi pengungkapan</li> <li>3. total pengungkapan</li> </ol>	<p>Rasio kinerja, rasio ketergantungan daerah, ukuran, kompleksitas pemerintahan, belanja daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya hubungan yang positif signifikan pengungkapan konten dengan: rasio ketergantungan daerah (DAU)</li> <li>2. Adanya hubungan yang positif signifikan presentasi pengungkapan dengan: tingkat ketergantungan daerah dan kompleksitas pemerintahan.</li> <li>3. Adanya hubungan yang positif signifikan</li> </ol>

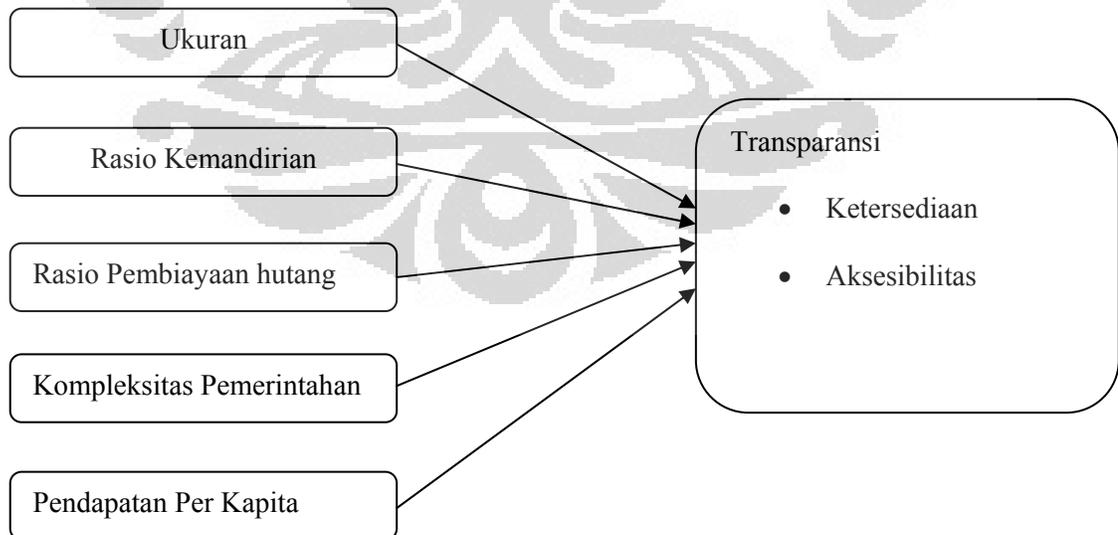
			total pengungkapan dengan: tingkat ketergantungan daerah
Jorge <i>et al.</i> (2011)	Transparansi Keuangan	kompetensi politik, orientasi politik, <i>political engagement</i> , rata-rata umur masyarakat, tingkat pendidikan, pendapatan masyarakat populasi, jumlah populasi dan tingkat kemandirian pemerintah daerah	Adanya hubungan yang positif signifikan ketersediaan CAFR dengan: jumlah populasi

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Kerangka Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk melihat ketersediaan dan aksesibilitas informasi keuangan yang diungkap pada situs resmi pemerintah daerah. Ketersediaan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesiapan suatu sarana untuk dapat digunakan atau dioperasikan dalam waktu yg telah ditentukan. Sedangkan Aksesibilitas dalam hal ini berkaitan dengan kemudahan dimana pengguna dapat mencari dan melihat informasi. Peneliti mengasumsikan karakteristik pemerintah daerah dan *socioeconomy* masing-masing daerah diperkirakan memiliki pengaruh terhadap ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses (*accessibility*) informasi keuangan daerah pada situs-situs resmi pemerintah daerah. Karakteristik daerah yang dijadikan objek penelitian adalah ukuran pemerintah daerah, tingkat kemandirian daerah, rasio pembiayaan hutang dan kompleksitas pemerintahan. Adapun faktor sosial dan ekonomi masyarakat yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah tingkat pendapatan perkapita.

**Gambar 3.1 Kerangka Model Penelitian**



Sumber: Telah diolah kembali

## 3.2 Pengumpulan Data

### 3.2.1 Populasi dan Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 524 pemerintah daerah di Indonesia yang terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan hasil LKPD 2009 yang telah di audit BPK. Sampel akan dipilih dari populasi dengan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan ketersediaan data-data pendukung variabel independen dan variabel dependen pada penelitian.

Kriteria-kriteria atas sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2009 Kabupaten/Kota yang telah diaudit oleh BPK.
2. Hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK menunjukkan opini WTP dan WDP.
3. Menyediakan situs resmi pemerintah daerah yang dapat di akses secara langsung melalui internet.
4. Menyediakan seluruh data-data statistik lengkap yang diperlukan untuk keseluruhan variabel pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.
5. Membuang *outlier* dengan menggunakan *casewiselist* pada software *SPSS* dengan 2 (dua) standar deviasi.

**Tabel 3.1 Ringkasan Pemilihan Sampel**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2009 di Indonesia	524
LKPD provinsi pada tahun 2009 di Indonesia	-33
Daerah yang belum diwajibkan untuk membuat LKPD tahun 2009	-20
Daerah yang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih dalam proses	-4
Daerah yang pemeriksaannya ditunda karena <i>force majeure</i> (bencana alam wasior)	-1
LKPD yang mendapat opini Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	-147
Pemerintah Daerah yang tidak memiliki situs resmi dan yang situs resminya tidak dapat diakses melalui internet	-52
Pemerintah Daerah yang Teridentifikasi Sebagai Outlier	-10
<b>Sampel terkumpul</b>	<b>257</b>

Sumber: Telah diolah kembali

Periode penelitian yang dilakukan untuk meneliti data pada variabel independen menggunakan data pada tahun 2009. Sedangkan periode pengamatan penelitian pada situs resmi pemerintah daerah untuk mengukur variabel dependen dilakukan pada akhir tahun (November-Desember 2011). Kriteria pemilihan sampel dilakukan dengan cara *purposive judgement sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Gujarati dan Porter, 2009).

### 3.2.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam mengukur variabel independen dan dependen pada penelitian ini adalah data sekunder. Data variabel independen diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2009, data statistik BPS dan data yang diperoleh dari situs pemerintah daerah. Sedangkan untuk data variabel dependen diperoleh dari masing-masing situs resmi pemerintah daerah.

### 3.3 Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian yang dilakukan oleh Styles dan Tennyson (2007). Model penelitiannya terdiri dari dua model. Model yang pertama menggunakan model regresi logistik. Regresi logistik digunakan untuk memprediksi variabel yang bersifat kategoris (dikotomi). Model penelitian ini bertujuan untuk menguji ketersediaan (ada/tidaknya) data informasi keuangan daerah yang dipublikasikan pada situs resmi pemerintah daerah sesuai dengan praktek yang ada di Indonesia.

$$\text{Model I : IKD} = \alpha + \beta_1 \text{SIZE} + \beta_2 \text{INDEP} + \beta_3 \text{LEV} + \beta_4 \text{TYPE} + \beta_5 \text{INC} + e \dots \dots \dots (1)$$

Model penelitian kedua menggunakan model regresi berganda untuk mengukur tingkat kemudahan dalam mengakses data informasi keuangan daerah tersebut pada situsnya.

$$\text{Model II: IKDakses} = \alpha + \beta_1 \text{SIZE} + \beta_2 \text{INDEP} + \beta_3 \text{LEV} + \beta_4 \text{TYPE} + \beta_5 \text{INC} + e \dots \dots \dots (2)$$

Dimana,

**Tabel 3.2 Deskripsi Variabel Dalam Model**

Variable	Deskripsi
IKD	Dummy variable: jika terdapat minimal salah satu informasi keuangan daerah yang diungkapkan pada <i>website</i> pemda maka ditulis dengan angka 1, jika tidak diungkapkan pada <i>website</i> ditulis 0
IKDakses	indeks aksesibilitas IKD
SIZE	Ukuran Pemerintah Daerah (Ln Total Aset)
INDEP	Tingkat Kemandirian Daerah (Total PAD/Total Pendapatan)
LEV	<i>Leverage</i> (Total Kewajiban Jangka Panjang/Total ekuitas)
TYPE	Kompleksitas Pemerintahan (Dummy pemda: jika pemerintah kota ditulis dengan angka 1, jika pemerintah kabupaten ditulis dengan angka 0)
INC	Pendapatan Perkapita Masyarakat (Ln PDRB)
e	Koefisien error

Sumber: Telah diolah kembali

### 3.4 Operasionalisasi Variabel

#### 3.4.1 Variabel dependen (terikat)

##### 1. Ketersediaan IKD

Penelitian ini menggunakan analisis logistik untuk melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen yang diteliti adalah Informasi Keuangan Daerah (IKD) yang dipublikasikan pada situs resmi pemerintah daerah. IKD yang diteliti adalah ketersediaan APBD atau salah satu dari komponen LKPD (LRA, Neraca. LAK, CaLK). Ini dikarenakan pada keterbatasan data yang diungkap pada situs resmi pemerintah daerah dan sangat jarang pemerintah daerah yang mengungkap keseluruhan item pada laporan keuangan secara lengkap. Penulis juga tidak memperhatikan tahun dari IKD tersebut. Selanjutnya, ada atau tidaknya Informasi Keuangan Daerah (IKD) pada situs resmi pemerintah daerah diukur dengan

menggunakan variabel *dummy*, dimana untuk pemerintah daerah yang menyediakan IKD akan diberikan *score* 1, sedangkan pemerintah daerah yang tidak menyediakan IKD akan diberi *score* 0.

## 2. Aksesibilitas IKD

Aksesibilitas pada penelitian ini berkaitan dengan kemudahan dimana pengguna dapat mencari dan melihat data informasi keuangan yang disediakan pada situs resmi pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan indeks aksesibilitas untuk mengukur tingkat kemudahan dalam memperoleh informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah yang dikembangkan oleh Styles & Tennyson (2007) dengan beberapa modifikasi yang disesuaikan dengan ketersediaan data dan peraturan di Indonesia. Modifikasi indeks aksesibilitas terletak pada data yang disediakan pada situs resmi pemerintah di Indonesia, yaitu data Informasi Keuangan Daerah (APBD/LKPD). Sedangkan penelitian sebelumnya meneliti data CAFR (Styles dan Tennyson, 2007). Pada penelitian ini, indeks aksesibilitas dihitung berdasarkan ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi setiap daerah di Indonesia dan hasil penjumlahan maksimal 13 poin untuk setiap daerah. Berikut merupakan langkah-langkah dalam menghitung nilai *Accessibility Index* adalah:

1. Poin 1 diberikan apabila situs resmi pemda muncul pada halaman pertama hasil penelusuran menggunakan *Google search engine* atau *Yahoo* ketika peneliti mengetikkan nama dari suatu daerah.
2. Tambah 1 poin apabila pada situs resmi pemda mempunyai *link* data informasi keuangan daerah (APBD/LKPD) pada halaman muka situs resmi pemda.
3. Tambah 1 poin apabila pada situs resmi pemda mempunyai *search engine* yang dapat mencari/*locate* informasi keuangan dengan mengetikkan kata tersebut pada *search engine* di situs.
4. Tambah 1 poin apabila data informasi keuangan didapat setelah membuka  $\leq 3$  halaman situs atau dengan  $\leq 3$  klik pada *mouse*.
5. Tambah 1 poin apabila data IKD pada situs pemda disediakan dalam bentuk file pdf atau format HTML atau excel atau j.peg.

6. Tambah 1 poin pada ketersediaan setiap item laporan keuangan berdasarkan PSAP (neraca, LRA, LAK, CaLK) dan APBD kabupaten/kota. Langkah 6 (enam) ini menghasilkan nilai maksimum 5 poin.
7. Tambah 1 poin apabila situs pemda menyediakan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya, minimal mencakup 2 tahun agar bisa diperbandingkan.
8. Tambah 1 poin apabila situs pemda menyediakan informasi untuk dapat mencetak dokumen-dokumen IKD.
9. Tambah 1 poin apabila situs pemda menyediakan detail kontak (telepon/fax dan atau email) untuk mendapatkan data IKD apabila tidak tersedia dalam situs.

(Sumber: telah diolah kembali)

### 3.4.2 Variabel Independen (bebas)

#### a. Ukuran (*SIZE*)

Ukuran pemerintah daerah adalah variabel untuk mengukur seberapa besar atau kecil sampel pemerintah daerah dan digunakan sebagai proksi tersedianya informasi pada situs pemerintah daerah. Laswad *et al.* (2005) menggunakan ukuran total aset pemerintah daerah di Portugal sebagai faktor yang mempengaruhi ketersediaan *Internet Financial Reporting* (IFR) pada situs resminya. Penelitian Rora (2010) juga menggunakan *Natural Logaritma* (Ln) total aset sebagai proksi dari variabel independen ukuran pemerintah daerah. Pada penelitian ini variabel ukuran pemerintah daerah dihitung dengan menggunakan proksi dari besarnya total aset pemerintah daerah.

$$SIZE = Ln \text{ Total ASET}$$

#### b. Rasio Kemandirian (*INDEP*)

Tingkat kemandirian daerah dihitung dari besarnya Pendapatan Asli Daerah berbanding dengan total realisasi anggaran pendapatan yang diterima (Rora, 2010). Liestiani (2008) juga menggunakan rasio PAD sebagai indikator ukuran kekayaan atau independensi pemerintah daerah. Tingginya pendapatan asli daerah menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik. Sebaliknya jika kinerja pemerintah daerah memburuk, maka rasio kemandiriannya akan semakin kecil.

$$\text{INDEP} = \text{TOTAL PAD} / \text{TOTAL PENDAPATAN}$$

**c. Rasio Pembiayaan Hutang (*leverage*)**

*Leverage* merupakan proporsi yang menggambarkan besarnya utang dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. Dengan demikian, jika total utang lebih besar dari modal, mengindikasikan bahwa sumber utama pendanaan entitas adalah dari pihak eksternal. Penelitian ini menggunakan proksi pembiayaan hutang yang sama dengan penelitian Laswad *et al.* (2005) dimana rasio pembiayaan hutang diukur dengan menghitung total kewajiban dengan total ekuitas dana pemerintah daerah.

$$\text{LEVERAGE} = \text{TOTAL KEWAJIBAN} / \text{TOTAL EKUITAS}$$

**d. Kompleksitas Pemerintahan (TYPE)**

Kompleksitas pemerintahan didefinisikan seberapa besar total populasi penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Semakin besar jumlah populasi pada daerah tertentu, semakin kompleks pemerintahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Penelitian Laswad (2005) menggunakan variabel *dummy* sebagai ukuran dari tingkat kompleksitas pemerintahan daerah.

**e. Pendapatan Per Kapita (INC)**

Styles (2007) menggunakan pendapatan per kapita sebagai faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas data keuangan di Amerika Serikat. Ia juga memperoleh bukti dengan semakin tinggi pendapatan perkapita di suatu daerah maka pemerintah juga cenderung memberikan kemudahan bagi warganya untuk mengakses informasi keuangan pada situs. Pada penelitian ini pendapatan per kapita dihitung berdasarkan *Natural Logaritma* (Ln) dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

$$\text{INC} = \text{Ln PDRB}$$

**Tabel 3.3 Ringkasan Operasional Variabel**

<b>Nama variabel</b>	<b>Ukuran</b>	<b>Prediksi Arah Hubungan</b>
SIZE	Ln Total Aset	+
INDEP	Total PAD/Total Pendapatan	+
LEV	Total Debt/Total Ekuitas	+
TYPE	<i>Dummy Pemda</i>	+
INC	Ln PDRB	+

Sumber: telah diolah kembali

### 3.5 Statistik Deskriptif

Menurut Mulyono (2003), statistik deskriptif berhubungan dengan peringkasan dan penyajian seperangkat data dalam bentuk yang dapat dipahami agar dapat memberikan nilai manfaat. Hasil pengolahan dan penyajian data tersebut juga dibandingkan untuk membantu memahami pengaruh variabel independen terhadap variabel terikat. Statistik deskriptif yang disajikan meliputi nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimal, nilai minimal, tabel frekuensi dan tabel uji beda rata-rata.

### 3.6 Pengujian Model Penelitian I-Model Ketersediaan

#### 3.6.1 Uji Asumsi Klasik

##### 1. Multikolinearitas

Pada model regresi klasik, terdapat asumsi utama dalam mengatasi error. Setiap estimasi ekonometri harus dibersihkan dari penyimpangan dari asumsi dasar yang diharapkan. Multikolinearitas adalah kondisi dimana hubungan antara variabel independen satu dengan variabel independen lainnya sangat tinggi sehingga tidak dapat diketahui variabel independen yang mana yang berpengaruh terhadap variabel dependennya. Multikolinearitas atau disingkat multiko dapat mendistorsi nilai dari koefisien regresi. Penelitian ini memakai ketentuan dimana nilai korelasi *pearson*

tidak boleh melebihi 0,80. Jika ada nilai korelasi melebihi 0,80 maka, terdapat indikasi multikolinearitas dalam model regresi. Selain menggunakan korelasi pearson, ada cara lain untuk mengatasi multiko yaitu dengan menggunakan *Variance Inflation Factors* (VIF). Multiko dikatakan berat apabila nilai VIF melebihi 10.

## 2. Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi liner kesalahan pengganggu ( $e$ ) mempunyai varians yang sama atau tidak dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji Heteroskedastisitas dapat diketahui dari nilai signifikan korelasi *Rank Spearman* antara masing-masing variabel independen dengan residualnya. Jika nilai signifikan lebih besar dari  $\alpha=5\%$  maka tidak terdapat Heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika lebih kecil dari  $\alpha=5\%$  maka terdapat Heteroskedastisitas. Dalam regresi logistik tidak mengasumsikan hubungan antara variabel independen dan dependen secara linear. Oleh karena itu dalam pengujian model I untuk ketersediaan data informasi keuangan pada situs pemerintah daerah yang di ukur menggunakan *dummy variabel* tidak memerlukan pengujian heteroskedastisitas ini.

## 3. Autokolerasi

*Uji autokorelasi* digunakan untuk melihat apakah ada hubungan linier antara *error* serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (*data time series*). Uji *autokorelasi* perlu dilakukan apabila data yang dianalisis merupakan data *time series* (Gujarati, 2009). Pada penelitian ini tidak dilakukan pengujian autokolerasi dikarenakan penelitian ini menggunakan data *cross section* dalam satu tahun.

### 3.6.2 Uji Kelayakan Model (*Chi-Square Goodness-of-Fit Test*)

*chi-square goodness-of-fit test* menghasilkan model yang menunjukkan variabel independen yang secara paling baik memprediksi variabel dependennya. *chi-square goodness-of-fit test* menunjukkan sejauh mana variabel independen dalam model dengan benar mengklasifikasikan pengamatan dalam sampel. Untuk menganalisis *chi-square goodness-of-fit test*, nilai aktual dari observasi dibandingkan dengan nilai prediksi pada variabel dependen. Perbandingan nilai aktual dan prediksi bisa dicapai dengan menggunakan beberapa pengukuran untuk mengukur kelayakan regresi, yaitu:

(1) dengan melihat *-2 Log Likelihood* (2) koefisien determinasi (*Cox & Snell R Square* dan *Nagelkerke R Square*) (3) menilai *chi-square* untuk keseluruhan model (*Hosmer and Lemeshow Test*)

### 1. Menilai -2 Log Likelihood

Dalam *software* SPSS untuk menguji *overall model fit* dapat dilihat dari nilai *-2 log likelihood*. SPSS memberikan 2 (dua) nilai *-2 log likelihood* yaitu nilai *-2 log likelihood* awal pada saat *block = 0* dan nilai *-2 log likelihood* akhir pada saat *block = 1*. Jika terjadi penurunan nilai *-2 log likelihood* pada saat *block = 0* ke *block = 1* maka, secara keseluruhan model fit dengan data (Ghazali, 2005).

### 2. Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R Square*)

Menurut Ghazali (2005) Dalam model logistik koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang digunakan berbeda dengan *multiple regression*. Koefisien determinasi yang digunakan dalam model logistik adalah *Nagelkerke R Square*. *Nagelkerke's R square* merupakan modifikasi dari koefisien *Cox dan Snell* untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu) (Ghazali, 2005). *Nagelkerke's R square* ini digunakan untuk mengukur seberapa besar variabilitas variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variabilitas variabel dependennya.

### 3. Uji *Hosmer and Lemeshow Test*

Berdasarkan Ghazali (2005) Untuk menguji kelayakan model regresi pada model logit digunakan *Hosmer dan Lemeshow test*. *Hosmer dan Lemeshow test* digunakan untuk menguji apakah data empiris telah sesuai dengan model penelitian. Hipotesa yang digunakan dalam pengujian ini adalah:  $H_0$ : Model telah mampu menjelaskan data empiris (*Model fit*).  $H_1$ : Model tidak mampu menjelaskan data empiris. Dasar keputusan adalah dengan memperhatikan nilai *Goodness of Fit test* yang diukur dengan nilai *Chi-Square* pada bagian bawah *Hosmer dan Lemeshow test*

- Jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima
- Jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_1$  diterima

Jika  $H_0$  ditolak berarti terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Namun.

Jika  $H_0$  diterima, maka model penelitian mampu memprediksi nilai observasinya atau dengan kata lain model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya.

### 3.6.3 Menilai Akurasi Model (*Classification table*)

*Classification table* juga digunakan untuk menganalisis hasil dari regresi. *Classification table* membandingkan nilai aktual dari observasi dengan nilai prediksi atas variabel dependen dengan menghitung probabilitas dari sampel yang diobservasi dan mengklasifikasikan data tersebut kedalam dua kategori (pada penelitian ini: menyediakan informasi keuangan atau tidak) berdasarkan probabilitas yang dihasilkan. *Classification table* juga mengindikasikan sejauh mana model dapat secara akurat mengklasifikasikan pengamatan. Karena regresi logistik selalu menghasilkan probabilitas, maka *classification table* dapat secara baik mengklasifikasikan.

### 3.6.4 Model Regresi yang Dihasilkan (*Variable in The Equation*)

Model regresi yang dihasilkan dapat dilihat dari *output* SPSS pada bagian *variabel equation*. Pada bagian tersebut dapat dilihat nilai koefisien dari masing - masing variabel dan tingkat signifikansi dari variabel tersebut. Hasil regresi yang dihasilkan ini menjadi acuan untuk menjawab hipotesa yang digunakan dalam penelitian ini. *Variabel equation* menyediakan berbagai informasi (beta, standar error (SE), *degree of freedom*, level signifikansi) dan dua pengujian statistik (uji *Wald* dan *Exp (B)*).

## 3.7 Pengujian Model Penelitian II

Untuk melihat tingkat aksesibilitas informasi keuangan pada situs pemerintah daerah, penelitian ini menggunakan *Ordinary Least Square regression analysis*. Langkah-langkah dalam melakukan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

### 3.7.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari heterokedastisitas dan multikolinearitas. Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian yang menggunakan data *cross section*.

### 1. Multikolinearitas

Adanya multikolinearitas dalam model penelitian dapat diketahui dengan membaca tabel *correlation matrix*. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas diantara variabel-variabel independen dalam model penelitian dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi antar variabel yang tidak ada yang melebihi 0.8. Adanya nilai korelasi  $> 0,8$  mengindikasikan bahwa terdapat multiko diantara variabel independen dalam model.

### 2. Heteroskedastisitas

Asumsi yang digunakan dalam uji asumsi klasik adalah homokedastisitas. Homokedastisitas artinya adalah probabilitas terhadap gangguan dianggap sama untuk seluruh pengamatan atas seluruh variabel bebas. Heterokedastisitas muncul jika terdapat perbedaan distribusi untuk seluruh pengamatan dengan varian eror yang berbeda untuk setiap pengamatan. Gejala homokedastisitas dapat dihindari dengan menggunakan *whiteheterokedasticity*.

### 3. Autokolerasi

Uji *autokorelasi* digunakan untuk melihat apakah ada hubungan *linier antara error* serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (*data time series*). Uji *autokorelasi* perlu dilakukan apabila data yang dianalisis merupakan *data time series* (Gujarati, 2009). Pada penelitian ini tidak dilakukan pengujian autokolerasi dikarenakan penelitian ini menggunakan *data cross section* dalam satu tahun.

#### 3.7.2 Evaluasi Hasil Regresi

Pengujian hipotesis pada model dilakukan dengan beberapa metode pengujian, diantaranya: uji koefisien determinasi, uji signifikansi serentak, dan uji signifikansi parsial.

##### 1. Uji F (Uji signifikansi serentak)

Uji F digunakan untuk membuktikan apakah variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Uji F dilakukan dengan membandingkan Prob.(F-stat) dan F-tabel. Jika nilai Prob. (F-stat) lebih besar daripada nilai kritis (F-Tabel), maka hipotesis  $H_0$  ditolak dan hipotesis  $H_1$  diterima.

## 2. Uji $R^2$ (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi dari nilai variabel terikatnya (dependen) dapat dijelaskan oleh variasi nilai dari variabel-variabel bebasnya. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1. Nilai koefisien determinasi yang semakin mendekati 1 menandakan model penelitian semakin baik yang dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya.

## 3. Uji T (Uji Signifikansi Parsial)

Uji t digunakan untuk melihat secara individual apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependennya dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Uji t dilakukan dengan membandingkan t-stat dengan t-tabel. Jika nilai t-stat lebih besar dari nilai kritis (t-tabel), maka hipotesis  $H_0$  ditolak dan hipotesis  $H_1$  diterima. Uji signifikansi parsial dapat dilakukan dengan metode lain, yaitu dengan melihat nilai Prob. pada hasil regresi. Jika nilai  $\text{Prob} < \alpha$ , maka hipotesis yang diuji ditolak, atau dapat disimpulkan bahwa variabel independennya tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya.

## BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Statistik Deskriptif

#### 4.1.1 Statistik Deskriptif Variabel Dependen

Tabel 4.1 merupakan tabel frekuensi ketersediaan informasi keuangan daerah (IKD) pada situs pemerintah daerah. Dari tabel 4.1 menunjukkan besarnya jumlah pemerintah daerah yang menyediakan data Informasi Keuangan Daerah pada situs resminya. Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui hanya sebanyak 35 situs pemerintah daerah yang menampilkan data informasi keuangan. Sedangkan sisanya sebanyak 222 pemerintah daerah tidak menampilkan informasi keuangan pada situsnya.

**Tabel 4.1 Frekuensi Ketersediaan IKD**

Ketersediaan IKD	Frekuensi	Persentase
<b>ADA</b>	35	13,6
<b>TIDAK ADA</b>	222	86,4
<b>Total</b>	257	100,00

Sumber: telah diolah kembali

Lebih lanjut lagi kita perhatikan, dari 35 situs pemerintah daerah, komponen IKD yang disajikan oleh ke 35 pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Ketersediaan IKD pada Situs Resmi 35 Pemda**

No.	Nama Daerah	Tingkat	Komponen IKD yang tersedia
1.	Karo	Kab	LRA
2.	Payakumbuh	Kota	APBD
3.	Pekanbaru	Kota	LRA
4.	Sukabumi	Kota	APBD
5.	Cimahi	Kota	LRA, LAK, NERACA, CaLK, APBD
6.	Pekalongan	Kota	LRA, LAK, NERACA, APBD
7.	Banyumas	Kab	APBD

8.	Bantang	Kab	LRA dan APBD
9.	Jepara	Kab	APBD
10.	Pati	Kab	APBD
11.	Pekalongan	Kab	APBD
12.	Pemalang	Kab	APBD
13.	Purbalingga	Kab	APBD
14.	Sukoharjo	Kab	APBD
15.	Wonogiri	Kab	APBD
16.	Semarang	Kota	LRA, LAK, NERACA, APBD
17.	Gunung Kidul	Kab	APBD
18.	Kulon Progo	Kab	APBD
19.	Sleman	Kab	LRA, LAK, NERACA
20.	Yogyakarta	Kota	LRA, LAK, NERACA
21.	Lamongan	Kab	LRA, NERACA, APBD
22.	Lumajang	Kab	APBD
23.	Malang	Kab	APBD
24.	Mojokerto	Kab	APBD
25.	Malang	Kota	LRA
26.	Mojokerto	Kota	APBD
27.	Lebak	Kab	APBD
28.	Gianyar	Kab	LRA
29.	Jembrana	Kab	APBD
30.	Lombok Tengah	Kab	APBD
31.	Flores Timur	Kab	APBD
32.	Kupang	Kota	APBD
33.	Pontianak	Kota	APBD
34.	Tabalong	Kab	APBD
35.	Gorontalo	Kota	APBD

Sumber: telah diolah kembali

Tabel 4.2 diatas menunjukkan deskriptif untuk masing-masing daerah atas ketersediaan IKD pada situs resmi pemerintah daerah. Dari tabel 4.3 hanya Kota Cimahi yang menyediakan keseluruhan komponen dari informasi keuangan daerah pada situs resminya. Daerah yang menyediakan keseluruhan dari komponen LKPD berdasarkan PSAP hanya pada situs resmi pemerintah daerah Semarang dan Pekalongan. Sedangkan sisanya sebanyak 32 atau sebesar 91,43% situs pemerintah daerah Kabupaten/Kota menampilkan  $\leq 3$  (Tiga) komponen dari informasi keuangan daerah.

**Tabel 4.3 Nilai Indeks Aksesibilitas IKD pada Situs Resmi 35 Pemda**

No.	Nama Daerah	Tingkat	Nilai Akses
1.	Karo	Kab	54%
2.	Payakumbuh	Kota	54%
3.	Pekanbaru	Kota	62%
4.	Sukabumi	Kota	54%
5.	Cimahi	Kota	100%
6.	Pekalongan	Kota	92%
7.	Banyumas	Kab	54%
8.	Batang	Kab	62%
9.	Jepara	Kab	54%
10.	Pati	Kab	46%
11.	Pekalongan	Kab	54%
12.	Pemalang	Kab	69%
13.	Purbalingga	Kab	69%
14.	Sukoharjo	Kab	62%
15.	Wonogiri	Kab	69%
16.	Semarang	Kota	85%
17.	Gunung Kidul	Kab	54%
18.	Kulon Progo	Kab	54%

19.	Sleman	Kab	69%
20.	Yogyakarta	Kota	69%
21.	Lamongan	Kab	77%
22.	Lumajang	Kab	62%
23.	Malang	Kab	62%
24.	Mojokerto	Kab	54%
25.	Malang	Kota	54%
26.	Mojokerto	Kota	62%
27.	Lebak	Kab	46%
28.	Gianyar	Kab	46%
29.	Jembrana	Kab	62%
30.	Lombok Tengah	Kab	62%
31.	Flores Timur	Kab	54%
32.	Kupang	Kota	62%
33.	Pontianak	Kota	54%
34.	Tabalong	Kab	54%
35.	Gorontalo	Kota	54%

Sumber: telah diolah kembali

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas diketahui persentase perbandingan tiap-tiap daerah atas informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Pemerintah daerah Kota Cimahi memiliki jumlah persentase aksesibilitas tertinggi dibandingkan seluruh daerah yaitu sebesar 100%. Oleh karena itu pemerintah Kota Cimahi dapat dikatakan sudah menerapkan transparansi atas informasinya dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya yang berbasis teknologi informasi. Sedangkan situs-situs pemerintah daerah lainnya dapat dikatakan sudah mulai mengembangkan situsnya dengan baik dan menjadikan internet sebagai media yang berguna untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan rata-rata persentase aksesibilitas ke informasi keuangan daerah sebesar 61%.

Selanjutnya, penulis menilai aksesibilitas setiap variabel independen melalui uji rata-rata untuk mengetahui indikasi awal variabel-variabel independen mana saja yang akan mempengaruhi aksesibilitas informasi keuangan pada situs pemerintah daerah. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan perhitungan rata-rata setiap variabel independen kemudian mengelompokkan setiap variabel tersebut menjadi dua kelompok (Rendah/Tinggi). Apabila nilai sampel diatas rata-rata sampel, maka sampel tersebut masuk pada kelompok tinggi, namun apabila nilai sampel dibawah rata-rata sampel, maka termasuk pada kelompok rendah.

Kemudian dilakukan uji *independent t-test* dengan menggunakan *software SPSS*. Dari hasil pengolahan *independent t-test*, merujuk pada tabel 4.4 bahwa variabel ukuran pemerintah daerah dan rasio kemandirian menghasilkan kesimpulan yang sama yaitu nilai rendah dan tinggi itu signifikan berbeda. Sedangkan untuk variabel independen *leverage* dan pendapatan per kapita nilai rendah dan nilai tinggi tidak berbeda atau sama.

**Tabel 4.4 Hasil Uji Beda Rata-Rata**

Variabel Independen	Beda Rata-Rata		Sig. T-Test
	Rendah/Kecil	Tinggi/Besar	
SIZE	0,0687	0,1256	0,062*
INDEP	0,0605	0,2007	0,000**
LEV	0,1074	0,0758	0,364
INC	0,1080	0,0867	0,492
	<b>Kabupaten</b>	<b>Kota</b>	
TYPE	0,0841	0,1479	0,074*

Sumber: telah diolah kembali

\*Signifikan pada  $\alpha=10\%$

\*\*Signifikan pada  $\alpha=1\%$

Keterangan:

SIZE = Ukuran Pemerintah Daerah

INDEP = Rasio Kemandirian

LEV = Rasio Pembiayaan Hutang

INC = Pendapatan PerKapita

IKD = Informasi Keuangan Daerah

Dari tabel 4.4 variabel *SIZE* pada kelompok Rendah memiliki nilai rata-rata 0,0687 di bawah nilai rata-rata tingginya sebesar 0,1256 dan memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari  $\alpha=10\%$  yaitu 0,062. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *SIZE* diindikasikan berhubungan positif signifikan terhadap aksesibilitas informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah.

Variabel *INDEP* pada kelompok rendah memiliki nilai rata-rata 0,0605 di bawah nilai rata-rata tingginya sebesar 0,2007 dan memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari  $\alpha=5\%$  yaitu 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *INDEP* diindikasikan berhubungan positif signifikan terhadap aksesibilitas informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah.

Variabel *LEV* pada kelompok rendah memiliki nilai rata-rata 0,1074 di atas nilai rata-rata tingginya sebesar 0,0758 dan memiliki nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha=10\%$  yaitu 0,364. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *LEV* diindikasikan tidak berhubungan terhadap aksesibilitas informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah.

Variabel *INC* pada kelompok rendah memiliki nilai rata-rata 0,1080 di bawah nilai rata-rata tingginya sebesar 0,0867 dan memiliki nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha=10\%$  yaitu 0,492. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *INC* diindikasikan berhubungan positif signifikan terhadap aksesibilitas informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah.

Variabel *TYPE* pada kelompok rendah memiliki nilai rata-rata 0,0841 di bawah nilai rata-rata tingginya sebesar 0,1479 dan memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari  $\alpha=10\%$  yaitu 0,074. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *TYPE* diindikasikan berhubungan positif signifikan terhadap aksesibilitas informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah.

#### **4.1.2 Statistik Deskriptif Variabel Independen**

Dari 257 sampel data pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat diketahui nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum data-data kuantitatif variabel independen yang diuji pada penelitian ini. Statistik deskriptif dijelaskan pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Statistik Deskriptif

N = 257	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SIZE	25.819.930.936,80	7.294.778.502.864,81	1.748.930.610.740,82	1.124.436.890.063,26
INDEP	0,0068	2,5146	0,0897	0,1766
LEV	0,0000	0,1102	0,0084	0,0162
TYPE	0	1	0,24	0,426
INC	1.635.000	302.869.000	17.013.163,42	25.601.796,38

Sumber: telah diolah kembali

Keterangan:

SIZE = Ukuran Pemerintah Daerah

INDEP = Rasio Kemandirian

LEVERAGE = Rasio Pembiayaan Hutang

TYPE = Kompleksitas Pemerintahan

INC = Pendapatan per Kapita

Pada Tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan statistik deskriptif yang telah dilakukan menggunakan *software* SPSS 17:

1. Variabel independen ukuran pemerintah daerah (SIZE) merupakan hasil dari Natural Logaritma total asset masing-masing pemerintah daerah. Dari hasil olah data diketahui bahwa nilai maksimum Rp 7.294.778.502.864,81 dan nilai minimum Rp 25.819.930,80. Daerah yang memperoleh nilai maksimum adalah pemerintah daerah kabupaten Siak. Sedangkan nilai minimum ditunjukkan pada pemerintah kabupaten Toraja Utara. Nilai rata-rata dari keseluruhan pemerintah daerah yang diteliti adalah sebesar Rp 1.748.930.610.740,82. Variabel *size* memiliki standar deviasi Rp 1.124.436.890.063,26. Hal ini menunjukkan bahwa variasi data variabel independen *size* adalah rendah.
2. Variabel independen rasio kemandirian daerah (INDEP) memiliki nilai maksimum 2,5146 dan nilai minimum 0,0068. Nilai maksimum dimiliki oleh

pemerintah Kabupaten Tabanan di Propinsi Bali. Artinya, pemerintah daerah Kabupaten Tabanan, Bali mampu untuk membiayai operasional daerahnya sendiri dengan 2,5146 dari pendapatan asli daerah. Sedangkan nilai minimum dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Nagan Raya yang terletak di Provinsi NAD. Artinya, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, sumber pembiayaan pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya yang berasal dari pendapatan asli daerah hanya sebesar 0,0068, sedangkan 99,9932% dibiayai oleh pendapatan selain pendapatan asli daerah.

3. Rasio pembiayaan hutang pada variabel independen memiliki nilai maksimum sekitar 11,02% dan nilai minimum 0%. Nilai maksimum atas rasio menggunakan pembiayaan hutang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan nilai minimum 0% dimiliki oleh 22 pemerintah daerah Kabupaten/Kota lainnya yang termasuk dalam sampel. Nilai rata-rata dari pembiayaan hutang sebesar 0,84%. Artinya, sumber pembiayaan pemerintah daerah yang berasal dari hutang ke pihak luar hanya sebesar 0,84%.
4. Variabel independen tingkat kompleksitas pemerintahan (TYPE) memiliki nilai rata-rata 24%. Sedangkan standar deviasinya sebesar 0,246. Hal ini menunjukkan bahwa variasi data variabel kompleksitas pemerintahan adalah tinggi
5. Variabel independen tingkat kesejahteraan masyarakat (INC) yang diukur berdasarkan tingkat pendapatan perkapita memiliki nilai maksimum Rp. 302.869.000 dan nilai minimum Rp. 1.635.000. Nilai maksimum pendapatan perkapita dimiliki oleh daerah Kabupaten Mimika dengan jumlah pendapatan perkapita Rp. 302.869.000. Sedangkan nilai minimum dimiliki oleh Kabupaten Karo dengan jumlah pendapatan perkapita Rp. 1.635.000. rata-rata pendapatan perkapita penduduk di Indonesia sebesar Rp 17.013.163,42. sementara itu, standar deviasinya sebesar Rp. 25.601.796,38. hal ini menunjukkan bahwa variasi data variabel independen tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia cukup tinggi.

## 4.2 Pengujian Model Penelitian I-*Availability*

### 4.2.1 Uji Asumsi Klasik: Multikolinearitas

Multikolinearitas pada hakekatnya adalah fenomena sampel yang tidak memenuhi asumsi dasar mengenai ketergantungan di antara variabel independen yang masuk dalam model.

**Tabel 4.6 Korelasi Pearson**

	SIZE	INDEP	LEV	TYPE	INC
SIZE	1,000000	-0,096128	-0,234918	-0,057758	0,256066
INDEP		1,000000	-0,056785	0,089634	0,077361
LEV			1,000000	0,018692	-0,136710
TYPE				1,000000	0,298013
INC					1,000000

Sumber: telah diolah kembali

Keterangan:

SIZE = Ukuran Pemerintah Daerah

INC = Pendapatan PerKapita

INDEP = Rasio Kemandirian

IKD = Informasi Keuangan Daerah

LEV = Rasio Pembiayaan Hutang

TYPE = Kompleksitas Pemerintahan

.Model regresi yang baik adalah model dimana variabel-variabel independen tidak memiliki korelasi atau hubungan linear antara yang satu dengan yang lainnya. Tabel 4.6 menunjukkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas diantara variabel independennya. Hal ini ditunjukkan dengan tinggi kolinearitas antar variabel independen tidak melebihi 0.80.

Selain itu ada cara lain untuk mendeteksi adanya multiko yaitu dengan melihat *Variance Inflation Factor*. VIF adalah estimasi seberapa besar multikolinearitas meningkatkan varian pada suatu koefisien estimasi sebuah variabel. Multiko dikatakan berat jika nilai VIF melebihi 10. Hasil estimasi multiko dapat dilihat dari tabel

## 4.2.2 Uji Kelayakan Model

### 1. Menilai -2 Log Likelihood

Untuk menguji kelayakan atas seluruh model langkah pertama adalah dengan menilai *overall fit model* terhadap data-data yang tersedia.

**Tabel 4.7 Omnibus Test of Model Coefficient**

	Chi-square	Df	Sig.
<b>Model</b>	26,545	5	0,000

Sumber: telah diolah kembali

Selisih nilai -2 *loglikelihood* dapat dilihat pada tabel 4.7 *omnibus test* yang memberikan nilai *chi-square goodness-of-fit test* sebesar 26,545 dengan derajat kebebasan (df) = 5. P-value (Sig) = 0,000 ≤ 0,05 sehingga hasil uji ini signifikan. Hasil perbandingan -2 loglikelihood Block=0 dan Block=1 dapat dilihat pada Lampiran 4.

### 2. Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)

Pengujian Nagelkerke R Square digunakan untuk menunjukkan besaran nilai koefisien determinasi dari model regresi logistik yang dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Model Summary**

Step	-2 log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	178,017	0,098	0,179

Sumber: telah diolah kembali

Koefisien Nagelkerke R Square pada *tabel summary* merupakan modifikasi dari koefisien Cox & Snell R Square agar nilai maksimumnya bisa mencapai satu dan mempunyai kisaran nilai antara 0 dan 1, sama seperti koefisien determinasi  $R^2$  pada regresi berganda. Pada tabel 4.8 *model summary* memberikan nilai statistik 0,179. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan 17,9% dari variabel dependennya. Sedangkan, sisanya sebesar 82,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian. Hal ini disebabkan karena masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi ketersediaan

IKD pada situs resmi pemerintah daerah yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

### 3. Uji Hosmer and Lemeshow Test

Uji Hosmer and Lemeshow Test digunakan untuk menilai kelayakan keseluruhan dari suatu model regresi logistik. Jika  $Sig > 0,05$  maka model regresi logistik biner tepat. Namun, jika  $Sig < 0,05$  maka model regresi logistik biner tidak tepat.

**Tabel 4.9 Hosmer and Lameshow Test**

Step	Sig.
1	0,863

Sumber: telah diolah kembali

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari penelitian ini adalah sebesar 0,863. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model mampu menjelaskan data empiris karena nilai *p-value(sig.)* melebihi 0.05. Dengan kata lain model regresi logistik biner dikatakan dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya.

#### 4.2.3 Menilai Akurasi Model (*Classification Table*)

*Classification table* digunakan untuk melihat seberapa baik prediksi model penelitian. Untuk model yang sempurna *overall percentage* akan bernilai 100%. Tabel 4.10 menunjukkan bahwa *overall percentage* yang memprediksi model dengan benar mempunyai nilai cukup baik sebesar **86,4%**.

**Tabel 4.10 *Classification Table***

Step	Observed	Percentage Correct
1	Overall	86,4

Sumber: telah diolah kembali

#### 4.2.4 Model Regresi yang Dihasilkan (*Variables In The Equation*)

Tabel 4.11 menampilkan *variables in the equation* yang digunakan untuk menunjukkan hasil pengujian koefisien regresi logistik atas model penelitian. Dari tabel 4.11 dapat diketahui signifikansi dari tiap-tiap variabel independen terhadap

variabel independennya. Hasil pengujian koefisien regresi logistik dapat dilihat dalam tabel 4.11 sebagai berikut:

**Tabel 4.11 Variables in The Equation**

	Prediksi Tanda	B	Sig.	VIF
CONSTANT		-22.897	0,014	
SIZE	+	1.228	0,001*	1.158
INDEP	+	2.295	0,006*	1.030
LEV	+	-22.951	0,270	1.073
TYPE	+	1.318	0,006*	1.126
INC	+	-1.327	0,001*	1.212

Sumber: telah diolah kembali

\*Signifikan pada  $\alpha=1\%$ ,

Keterangan:

SIZE = Ukuran Pemerintah Daerah

INDEP = Rasio Kemandirian

LEV = Rasio Pembiayaan Hutang

TYPE = Kompleksitas Pemerintahan

INC = Pendapatan PerKapita

IKD = Informasi Keuangan Daerah

#### 4.2.5 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

##### 1. Pengaruh Ukuran (*Size*) Pemerintah Daerah Terhadap Ketersediaan IKD Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah

Tabel 4.11 menunjukkan hasil regresi logit dimana variabel ukuran (*size*) memiliki koefisien regresi positif sebesar 1,228 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran (*size*) mendukung hipotesis 1a mengenai pengaruh ukuran (*size*) terhadap ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena nilai signifikansi dari variabel ukuran (*size*) menunjukkan nilai yang lebih kecil dari  $\alpha=1\%$ . Hasil output *SPSS* pada tabel 4.11 pada variabel ukuran menunjukkan bahwa hipotesis 1a diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Serrano *et al.* (2008) dan Piotrowski dan Bertelli (2010) yang memberikan kesimpulan dari hasil penelitiannya bahwa variabel independen ukuran (*size*) berpengaruh positif signifikan

terhadap ketersediaan IKD pada situs resmi pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa semakin besar total aset pemerintah daerah, maka semakin besar pula sumber daya yang dialokasikan pemerintah daerah untuk pengembangan situsnya. Jika dikaitkan dengan efisiensi biaya dan waktu, internet merupakan media yang lebih efisien dibandingkan dengan media tradisional (*hard copy*), sehingga sejumlah sumber daya yang dialokasikan untuk pengembangan situs daerah dapat memberikan *feed back value* bagi pemerintah daerah itu sendiri. Dan kewajiban akan transparansi kepada publik bisa terpenuhi.

## **2. Pengaruh Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Terhadap Ketersediaan IKD Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah**

Hipotesis kedua menguji pengaruh rasio kemandirian pemerintah daerah terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah pada situs resminya. Variabel rasio kemandirian daerah diukur dari rasio pendapatan asli daerah. Tabel 4.11 memperlihatkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah daerah (INDEP) memiliki koefisien regresi positif sebesar 2,295. Nilai signifikansi variabel independen tingkat kemandirian pemerintah daerah (INDEP) sebesar 0,006 lebih kecil dari nilai  $\alpha=1\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel INDEP berpengaruh positif signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Hasil output SPSS pada tabel 4.11 pada variabel kemandirian daerah menunjukkan bahwa hipotesis 2a diterima

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rora (2010). Penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah yang diukur dari rasio pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap total pengungkapan pada situs resmi pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan penggunaan indeks pengungkapan yang merupakan kombinasi dari pengungkapan sukarela pelaporan keuangan dan non-keuangan. Sedangkan pada penelitian ini fokus pada pengungkapan sukarela atas ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah.

Namun, penelitian ini sejalan dengan penelitian Laswad *et al.* (2005) yang menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah yang dilihat berdasarkan *own revenue percapita* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan sukarela informasi

keuangan pada situs resminya, dimana penelitiannya fokus kepada informasi keuangan yang tersedia pada situs. Semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin tinggi semakin tinggi pula kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya. Pemerintah daerah yang kinerjanya lebih baik cenderung menyediakan lebih banyak informasi keuangan pada situsnya.

### **3. Pengaruh Rasio Pembiayaan Hutang (*Leverage*) Terhadap Ketersediaan IKD Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah**

Hipotesis ketiga menguji pengaruh rasio pembiayaan hutang terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah pada situs resminya. Variabel rasio pembiayaan hutang diukur dari rasiototal hutang. Tabel 4.11 memperlihatkan bahwa rasio pembiayaan hutang memiliki koefisien regresi negatif sebesar -22,951. Nilai signifikansi variabel independen rasio pembiayaan hutang sebesar 0,270 lebih besar dari nilai  $\alpha=5\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel rasio pembiayaan hutang tidak berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Hasil output *SPSS* pada tabel 4.11 pada variabel ukuran menunjukkan bahwa hipotesis 3a ditolak.

Terdapat perbedaan hasil penelitian untuk model pertama mengenai ketersediaan IKD pada situs dengan penelitian yang dilakukan oleh Laswad *et al.* (2005), dimana pada penelitiannya diperoleh bukti bahwa variabel *leverage* berpengaruh positif secara signifikan terhadap ketersediaan data keuangan pada situs. Hal ini dikarenakan manajer politik pemerintah daerah di New Zealand sangat memperhatikan adanya beban hutang yang tinggi, karena mereka menganggap pelaporan data keuangan pada internet merupakan sarana yang potensial untuk memfasilitasi pemantauan oleh kreditor. Oleh sebab itu tingkat *leverage* yang tinggi akan memberikan pengaruh terhadap ketersediaan data keuangan pada situs resmi pemerintah daerah.

Hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya disebabkan karena pada prakteknya di Indonesia adanya beban hutang yang tinggi justru sebaliknya akan mengurangi jumlah pengungkapan sukarela atas data informasi keuangan pada situs. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah di Indonesia belum

menunjukkan peningkatan transparansi atas informasi-informasi keuangan yang dimilikinya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ingram (1984) dan Christaens (1999) bahwa variabel *leverage* tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan kepada publik.

#### **4. Pengaruh Kompleksitas Pemerintahan Terhadap Ketersediaan IKD Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah**

Hipotesis keempat peneliti menguji pengaruh kompleksitas pemerintahan terhadap ketersediaan IKD pada situs resmi pemerintah daerah di Indonesia. Pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa koefisien regresi adalah sebesar 1,318 dengan nilai signifikansi sebesar 0,006. Nilai signifikansi yang lebih rendah nilai  $\alpha=1\%$  dan koefisien yang bertanda positif, menunjukkan bahwa variabel kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap ketersediaan data IKD pada situs resmi pemerintah daerah di Indonesia. Dengan hasil ini, maka hipotesis 4a diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laswad *et al.* (2005) dimana tipe pemerintahan yang berbentuk kota yang penduduknya lebih besar dan beragam situs pemerintah daerahnya lebih canggih dan lebih banyak informasi yang diungkap pada situsnya. Laswad *et al.* (2005) memperoleh bukti bahwa tipe pemerintahan berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah.

#### **5. Pengaruh Pendapatan Per Kapita Terhadap Ketersediaan IKD Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah**

Hipotesis kelima menguji pengaruh pendapatan per kapita terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah pada situs resmi pemerintah daerah. Variabel pendapatan perkapita diukur dari *Logaritma* natural dari PDRB. Tabel 4.11 memperlihatkan bahwa pendapatan per kapita (INC) memiliki koefisien regresi sebesar -1,327. Nilai signifikansi variabel independen pendapatan perkapita (INC) sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai  $\alpha=1\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel INC berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Dengan hasil ini, maka hipotesis 5a diterima.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Styles dan Tennyson (2007) yang mengukur ada tidaknya data keuangan yang dipublikasikan pemerintah daerah di Amerika dengan menggunakan variabel pendapatan perkapita penduduk. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa besarnya pendapatan per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap ketersediaan data keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Hasil yang positif signifikan juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Serrano *et al.* (2008), bahwa income per capita penduduk dapat mempengaruhi ketersediaan data keuangan pada situs pemerintah lokal.

Perbedaan penelitian ini dengan yang terdahulu adalah karena jumlah pendapatan per kapitanya berasal dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah populasi di suatu daerah. Jumlah pendapatan per kapita yang tinggi tidak secara otomatis memberikan pengaruh pada ketersediaan informasi keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan statistik deskriptif jumlah pendapatan perkapita tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Mimika dengan jumlah PDRB per kapita sebesar Rp. 302.869.000. Tingginya nilai PDRB bisa terjadi karena jumlah kekayaan sumber daya potensial daerah yang tinggi tidak sebanding dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Tingginya pendapatan per kapita tidak secara langsung memberikan dampak bahwa penduduknya membutuhkan informasi keuangan yang dikeluarkan pemerintah daerah pada situsnya. Karena selain berdasarkan faktor pendapatan ada faktor lain seperti tingkat pendidikan dan akses jaringan internet yang dimiliki oleh daerah yang menjadi alasan penduduk di daerah menginginkan informasi tersebut tersedia pada situs pemerintah daerah.

#### **4.3 Pengujian Model Penelitian II- *Accsesibility***

##### **4.3.1 Uji Asumsi Klasik**

###### **1. Uji Multikolinieritas**

Pengujian terhadap terjadinya korelasi diantara sesama variabel bebas atau gejala multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan matriks korelasi. Apabila terdapat korelasi yang cukup tinggi antara masing-masing variabel independen maupun dependen ( $>0,80$ ) maka terdapat indikasi gejala multikolinearitas.

Hasil uji multiko dapat dilihat pada tabel 4.6 korelasi *pearson*. Berdasarkan hasil korelasi *pearson* yang di uji menggunakan *SPSS 18*, terlihat bahwa tidak ada korelasi yang kuat antar variabel independen yang digunakan. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada gejala multikolinearitas antar variabel independen pada seluruh model.

## 2. Uji Heterokedastisitas

Setelah dilakukan uji multikolinearitas, pengujian asumsi selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas dalam model regresi. Pengujian adanya gejala heterokedasitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *White Heterokedasticity*. Pengujian dilakukan pada keseluruhan model. Bila  $P\text{-Value} < \alpha$ , maka terdapat indikasi ditemukannya gejala heterokedasitas. Hasil uji heteroskedastisitas pada model yang di uji, dengan tingkat keyakinan 95% ditemukan adanya gejala heterokedastisitas. Menurut Gujarati (2004), masalah heteroskedastisitas dapat diatasi dengan menggunakan beberapa cara, diantaranya melakukan transformasi variabel, semi log atau akar kuadrat dan menggunakan *Weighted least Square (WLS)*. Jika metode WLS digunakan, diasumsikan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model regresi, sehingga uji heteroskedastisitas tidak perlu dilakukan. Tabel 4.12 menunjukkan data setelah diberi *treatment* adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Berganda Setelah *Treatment***

Variabel	Prediksi		Prob.
	Tanda	Koef.	
C		-22.34991	
SIZE	+	0,057802	0,0003**
INDEP	+	0,157312	0,1259
LEV	+	-0,845033	0,0449*
TYPE	+	0.093054	0,0136*
INC	+	-0.064588	0,0007**
Adj. R <sup>2</sup>		0.068933	
Prob. F-stat		0.000336	

Sumber: telah diolah kembali

\*Signifikan pada  $\alpha=5\%$

\*\*Signifikan pada  $\alpha=1\%$

Keterangan:

SIZE = Ukuran Pemerintah Daerah

INC = Pendapatan PerKapita

INDEP = Rasio Kemandirian

IKD = Informasi Keuangan Daerah

LEV = Rasio Pembiayaan Hutang

POP = Kompleksitas Pemerintahan

### 4.3.2 Uji Kelayakan Model

#### 1. F-Test (Uji Signifikansi Serentak)

Uji signifikansi serentak digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya. Jika Prob (F-Stat)  $< \alpha$ , maka model diterima. Hasil dari uji signifikansi serentak pada tabel 4.12 adalah bahwa nilai Prob (F-Stat)  $0.000336 < 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa model diterima atau dengan kata lain secara keseluruhan variabel independen ukuran, rasio kemandirian, rasio pembiayaan hutang, kompleksitas pemerintahan dan pendapatan perkapita secara bersama-sama mempengaruhi tingkat aksesibilitas informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Indonesia.

#### 2. Uji $R^2$ (Koefisien Determinasi)

Uji  $R^2$  (koefisien determinasi) digunakan untuk melihat seberapa besar variasi dari nilai variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi nilai dari variabel-variabel independennya. Merujuk pada tabel 4.12 nilai koefisien determinasi yang diukur dengan menggunakan *Adjusted-R<sup>2</sup>* pada model regresi adalah sebesar 6,8933%. Nilai *Adjusted-R<sup>2</sup>* ini menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan 6,8933% dari variabel independennya. Hal ini dikarenakan masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

### 4.3.3 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

#### 1. Ukuran (*SIZE*)

Berdasarkan hasil regresi yang ditunjukkan pada tabel 4.12, dengan tingkat signifikansi 99%, Hipotesis 1b diterima untuk model aksesibilitas informasi data keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan melihat

nilai koefisien regresi sebesar 0,057802 dengan Prob. Size 0,0003. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel *size* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap aksesibilitas informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah, karena nilai Prob. dari variabel *size* menunjukkan nilai yang lebih kecil dari  $\alpha = 1\%$ .

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Styles dan Tennyson (2007). Mereka menemukan bahwa ukuran *municipalities* (pemerintah lokal) di Amerika Serikat berpengaruh positif terhadap aksesibilitas informasi keuangan (CAFR) pada situs. Hal tersebut memberikan kesimpulan bahwa pemerintah daerah yang memiliki total aset yang lebih besar, secara otomatis akan memberikan kemudahan bagi warganya untuk dapat mengakses informasi keuangan pada situs resminya. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah aset, semakin besar pula sumber daya yang dapat dialokasikan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah dalam mengembangkan situs resminya menjadi lebih baik. Sebuah situs dikatakan lebih baik apabila informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pengguna tersedia dan mudah dijangkau serta memberikan kenyamanan bagi pengguna untuk mengakses informasi tersebut.

## 2. Rasio Kemandirian (INDEP)

Rasio kemandirian pemerintah menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Rasio kemandirian dihitung berdasarkan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan. Merujuk pada hasil uji regresi berganda pada tabel 4.12, dengan tingkat kepercayaan 95%, rasio kemandirian daerah (INDEP) tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah karena nilai Prob. INDEP sebesar 0,1259 lebih besar dari  $\alpha=5\%$  dan nilai koefisiennya sebesar 0,157312. Hipotesis 2b ditolak untuk model penelitian aksesibilitas informasi keuangan pada situs pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rora (2010) yang menunjukkan rasio PAD tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela dari keseluruhan model pengungkapan pada situs resmi pemerintah daerah di Indonesia. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah yang kinerjanya lebih baik, tidak secara

langsung akan menyediakan kemudahan dalam mengakses informasi keuangan pada situs resminya.

### 3. Rasio Pembiayaan Hutang (*LEVERAGE*)

Hipotesis 3b diterima untuk model aksesibilitas data informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan melihat nilai koefisien regresi sebesar  $-0,845033$  dengan Prob. *leverage*  $0,0449$ . Nilai Prob. yang lebih rendah dibandingkan  $\alpha=5\%$  dan nilai koefisien yang bertanda negatif menunjukkan bahwa variabel *leverage* berpengaruh negatif terhadap aksesibilitas informasi keuangan pada situs pemerintah daerah.

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah yang rasio pembiayaannya lebih tinggi cenderung akan mengurangi akses ke informasi keuangan pada situs resminya. Hal ini dikarenakan penggunaan hutang yang lebih tinggi sebagai sumber pembiayaannya akan memberikan sinyal kinerja pemerintah daerah yang rendah. Oleh sebab itu pemerintah daerah yang rasio pembiayaannya lebih besar cenderung akan membatasi akses pengguna ke informasi keuangannya. Pembatasan akses akan memberikan dampak bahwa pemerintah daerah kurang transparan atas informasi-informasi yang dimilikinya.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Laswad *et al* (2005) yang menyatakan bahwa rasio pembiayaan hutang (*leverage*) memiliki hubungan yang positif terhadap pengungkapan sukarela atas informasi keuangan di internet. Hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dapat disebabkan karena pada penelitian Laswad *et al.* (2005) pembiayaan yang diperoleh pemerintah daerah Selandia Baru berasal dari pengeluaran obligasi daerah.

Pengungkapan sukarela pada situs pemerintah daerah merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai pengawasan atas pengelolaan keuangan yang sangat diperhatikan oleh pemegang obligasi tersebut. Sedangkan di Indonesia pinjaman terhadap pemerintah daerah baru sebatas pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah. Penerbitan obligasi daerah pemerintah daerah merupakan alternatif sumber pendapatan yang dasar hukumnya sudah tercantum

dalam UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan dan PP No. 30 tahun 2011.

#### **4. Kompleksitas Pemerintahan (TYPE)**

Merujuk pada hasil uji regresi berganda pada tabel 4.12 dengan tingkat kepercayaan 95%, variabel kompleksitas pemerintahan (TYPE) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat aksesibilitas informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah karena nilai koefisien regresinya adalah nilai Prob. POP adalah sebesar 0,0136 lebih rendah dari  $\alpha=5\%$  dan nilai koefisiennya sebesar 0,093054. Hipotesis 4b diterima untuk model penelitian aksesibilitas informasi keuangan pada situs pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Laswad *et al.* (2005) yang menyatakan bahwa tipe pemerintahan memiliki hubungan yang positif terhadap praktik pengungkapan sukarela pada situs pemerintah daerah. Laswad *et al.* (2005) mengatakan bahwa internet merupakan fenomena kehidupan urban. Sebuah daerah urban/perkotaan ditandai dengan kepadatan penduduk tinggi dan fitur/keberagaman manusia yang luas dibandingkan dengan daerah sekitarnya Hasil penelitian Laswad *et al.* (2005) membuktikan bahwa kota-kota dengan jumlah penduduk yang tinggi dan beragam cenderung pemerintah daerahnya memberikan kemudahan dan kenyamanan yang lebih untuk mengakses data keuangan pada situs resminya.

#### **5. Pendapatan Per Kapita (INC)**

Hipotesis 5b diterima untuk model aksesibilitas data informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan melihat nilai koefisien regresi sebesar -0,064588 dengan Prob. INC 0,0007. Nilai Prob. yang lebih rendah dibandingkan  $\alpha=1\%$  dan nilai koefisien yang bertanda negatif menunjukkan bahwa variabel INC berpengaruh negatif terhadap aksesibilitas informasi keuangan pada situs pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Styles dan Tennyson (2007) yang menyatakan bahwa pendapatan perkapita masyarakat berpengaruh positif terhadap kemudahan dalam mengakses data keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Dari hasil penelitian ini tingginya pendapatan per kapita tidak secara

langsung memberikan dampak bahwa penduduknya membutuhkan informasi keuangan yang dikeluarkan pemerintah daerah pada situsnya. Karena selain berdasarkan faktor pendapatan ada faktor lain seperti tingkat pendidikan dan akses jaringan internet yang dimiliki oleh daerah yang menjadi alasan penduduk di daerah menginginkan informasi tersebut tersedia pada situs pemerintah daerah. Hal ini yang juga menjadikan pemerintah daerah tidak terlalu memperhatikan penggunaan ICT sebagai sarana untuk memudahkan pengguna mengakses informasi-informasi pada situs.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang sejauh mana faktor-faktor seperti ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian, *leverage*, kompleksitas pemerintahan dan pendapatan per kapita dapat mempengaruhi transparansi pemerintah daerah yang dilihat berdasarkan ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses Informasi Keuangan Daerah (IKD) pada situs resminya. Penelitian ini dilakukan terhadap 257 sampel, terdiri atas 61 pemerintah Kota dan 196 pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dalam pengujian model I yang menggunakan metode logit menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian, dan kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan per kapita masyarakat berpengaruh negatif signifikan informasi keuangan pada situs. Selanjutnya hasil penelitian pada pengujian model II menggunakan metode regresi berganda menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah dan kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Sedangkan *leverage* dan pendapatan per kapita masyarakat berpengaruh negatif signifikan informasi keuangan pada situs.

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Penggunaan kata kunci (*query*) yang digunakan penulis bisa jadi berbeda dalam *me-locate* situs pemerintah daerah.
2. Terdapat unsur subjektivitas penulis dalam menilai indeks aksesibilitas.

3. Rendahnya kemampuan variabel independen yang digunakan pada penelitian ini menyebabkan variabel dependen yang diuji pada penelitian belum dijelaskan secara luas oleh variabel independennya.
4. Hanya meneliti ketersediaan informasi keuangan pada situs pemerintah Kabupaten dan Kota saja.

### 5.3 Saran

Dengan mempertimbangkan keterbatasan pada penelitian diatas, peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Menggunakan kata kunci yang lebih spesifik dalam pencarian awal situs pemerintah daerah menggunakan pada *search engine*. Misal: Cimahi → Kota Cimahi.
2. Melakukan *cross check* agar dapat diketahui kesamaan dalam penilaian indeks aksesibilitas IKD sehingga penilaiannya lebih objektif.
3. Menambahkan variabel-variabel penelitian seperti tingkat pendidikan masyarakat tiap daerah, jumlah penduduk yang memasang jaringan internet dirumah pada tiap-tiap daerah, kompetensi politik masing-masing daerah, kualitas informasi keuangan yang ditampilkan pada situs, dan *press visibility* yang pada Negara lain dijadikan sebagai bahan penelitian terkait pengungkapan sularela pada situs resmi pemerintah pemerintah daerah.
4. Menggunakan sampel pemerintah Propinsi sebagai bahan penelitian selanjutnya atas pengungkapan sukarela yang berkaitan dengan informasi keuangan pada situs resminya

#### 5.4 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan, keterbatasan dan saran di atas maka implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memotivasi pemerintah daerah agar mulai membangun dan mengembangkan situs pemerintah daerahnya dan sebagai bahan perbandingan dengan pemerintah daerah lain.
2. Pengembangan pada sistem ICT pada situs pemerintah daerah dapat menjadikannya sarana berkomunikasi dengan masyarakat agar dapat dinilai lebih transparan dan akuntabel.



## DAFTAR REFERENSI

- Ahn, Michael J. (2011). *Adoption of E-Communication Applications in U.S. Municipalities: The Role of Political Environment, Bureaucratic Structure, and the Nature of Applications*. American Review of Public Administration. Vol. 41 Issue 4, p428-452, 25p
- Alvarez, R. M. and Hall, T. E. (2006). *Controlling Democracy: The Principal Agent Problems in Election Administration*. Policy Studies Journal, 34 (4), 491-510.
- Baum, C. and A. Di Maio. (2000). *Gartners four phases of e-government model*. <http://www.gartner.com/DisplayDocument?id=317292>
- Chadwick, A., & May, C. (2003). *Interaction between States and Citizens in the Age of the Internet: E-Government in the United States, Britain, and the European Union*. Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, vol.16 (2), page: 271-300.
- Christaens, J. (1999). *Financial Accounting Reform in Flemish Municipalities: An Empirical Investigation*. Financial Accountability & Management, 15 (1), 21-40.
- Evans III, J.H., Patton, J.M. (1987). *Signalling and Monitoring in Public -Sector Accounting*. Journal of Accounting Research. Volume 25. Pages 130-158.
- Gang, T. (1988). *Governmental Accounting and Auditing in China: Evolution and Current Reforms*. Governmental Accounting and Auditing: International Comparisons, Routledge, London, 122-48.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Giroux, G., & Deis, D. (1993). *Investor Interests and Government Accounting Disclosure*. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 6 (1), 63-78.
- Giroux, G., & McLelland, A. J. (2003). *Governance Structures and Accounting at Large Municipalities*. Journal of Accounting and Public Policy, 22, 203-230.

- Gore, A. K.(2004). *The Effects of GAAP Regulation and Bond Market Interaction on Local Government Disclosures*. Journal of Accounting and Public Policy. Volume 23, Pages 23-52.
- Groff, J.E., & Pittman, M. K. (2004). *Municipal Financial Reporting on The World Wide Web: A Survey of Financial Data Displayed on The Official Websites of The 100 Largest U.S. Municipalities*. Journal of Government Financial Management, 53 (2), 20-30.
- Gujarati, D. N., & Porter, Dawn C. (2009). *Basic Econometrics: 5th Edition*. Boston: McGraw-Hill Irwin.
- Hartono, D. U., & Mulyanto, E. *Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web*. 2010. Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1
- Ingram, R. W.(1984). *Economics Incentives and The choice of State Government Accounting Practices*. Journal of Accounting Research. Volume 22 (1), Pages 126-144.
- Jensen, M. C. and Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics. Volume 3, 305-360.
- Laswad,F., Fisher, R. Oyelere, P. (2005). *Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities*. Journal of Accounting and Public Policy, 24, 101-121.
- Liestiani, Anissa. (2008). *Pengungkapan LKPD Kab/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006*. Skripsi FEUI 2008.
- Mohammed Hisham Hanifa & Hafidz-Majdi Ab. Rashid. (2005). *The Determinant of Voluntary Disclosures in Malaysia: The Case of Internet Financial Reporting*. UNITAR E-Journal,2(1), 22-42.
- Moon, J. (2002). *The Evolution of E-government Among Municipalities: Rhetoric or Reality?*. Public Administration Review, 62 (4), 424-433.

- Nachrowi, D.N. Hardius Usman. (2002). *Penggunaan Teknik Ekonometri. Pendekatan Populer & Praktis Dilengkapi Teknik Analisis & Pengelolaan Data Dengan Menggunakan Paket Program SPSS*. PT Raja Grafindo Persada.
- O'brien A. James and George M. Marakas. (2011). *Management Information System 10<sup>th</sup> edition*. McGraw-Hill Irwin.
- Piotrowski, S. J., & Bartelli, A. (2010). *Measuring Municipal Transparency. 14th IRSPM Conference*, Bern, Switzerland, April.
- Robbins, W.A., & Austin, K. R. (1986). *Disclosure Quality in Governmental Financial Reports: An Assessment of The Appropriateness of A Compound Measure*. *Journal of Accounting Research*, 24 (2), 412-421.
- Rora, Puspita Sari. (2010). *Pengaruh Kinerja, Tingkat Ketergantungan dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela pada Situs Pemda Tahun 2010*. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.
- Serrano-Cinca, Carlos, Mar Rueda-Tomas, Pilar Portillo-Tarragona. (2008). *Factors Influencing E-disclosure in Local Public Administrations*. Working Paper No. 2008-03, Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales, Universidad de Zaragoza.
- Styles, Alan K., Mack Tennyson. (2007). *The Accessibility of Financial Reporting U.S. Municipalities on The Internet*. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19 (1), 56-92.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta. 2007.
- Thompson, F. (1998). *Public Economics and Public Administration*. *Handbook of Public Administration*, 2nd ed. Marcel Dekker. New York, NY. 995-1063.
- Zelda, Retina. (2007). *Tingkat Kepatuhan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indoensia Terhadap PP No. 24 Tahun 2005 dan Hubungannya dengan Pendapatan Asli Daerah dan Total Aktiva*. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.
- Zimmerman, Jerold L. (1977). *The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives*. *Journal of Accounting Research*. Vol. 15, 107-144.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Keuangan.